

**PERKEMBANGAN EKONOMI
KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Triwulan II - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Palangkaraya**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
1 Indikator Kegiatan Ekonomi	7
1.1. Kajian Umum	7
1.2. Sisi Produksi	8
1.3. Sisi Pengeluaran (Jenis Penggunaan)	11
1.4. Kontribusi Daerah Tingkat II	12
1.5. Keuangan Daerah	18
1.6. PMA dan PMDN	20
1.7. Perdagangan Luar Negeri	21
2. Perkembangan Inflasi	24
2.1. Kajian Umum	24
2.2. Inflasi Kota Palangka Raya	25
2.3. Inflasi Kota Sampit	29
3. Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	38
3.1. Perkembangan Perbankan	38
3.2. Perkembangan Aset	38
3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga	39
3.4. Perkembangan Kredit dan LDR	40
3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran	45
 Boks : Optimalisasi Pemberdayaan UMKM melalui Kerjasama Pemda, Lembaga Penjaminan Kredit dan Perbankan : Suatu Solusi bagi Pengembangan UMKM di Daerah	
4. Outlook Perekonomian Regional	64

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada triwulan II-2006 (*moving sum*) tercatat mengalami pertumbuhan positif (Y-o-Y) sebesar 8,42%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,65% dengan nilai sebesar Rp14.474,94 milyar.

Dari sisi produksi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor pertanian dalam arti luas yaitu sebesar 14,36% diikuti sektor pertambangan dan penggalian (9,87%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (9,85%). Ditinjau dari sumbangannya, sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi kontributor utama dengan nilai sumbangan sebesar 45,97%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,65%) dan sektor jasa-jasa (11,96%).

Dari sisi jenis penggunaan, konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 66,46% sementara investasi yang dilakukan tercatat hanya sebesar 11,21% dari PDRB. Di lain sisi, ekspor-impor antar daerah dimana nilai ekspor lebih kecil dari impor yang dilakukan menyebabkan terjadinya net impor sehingga menyumbang PDRB sebesar -9,49%.

KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan daerah Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II-2006 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah

mencapai 55,12% dengan nilai sebesar Rp443,21milyar sedangkan realisasi belanja daerah hanya mencapai 23,33% dengan nilai sebesar Rp183,89milyar sehingga mengalami surplus sebesar Rp259,31milyar. Belanja modal untuk aparatur daerah tercatat sebesar 30,45% dari anggaran 2006 sedangkan belanja modal untuk pelayanan publik baru terealisasi sebesar 22,61%.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI (EKSPOR-IMPOR)

Ekspor komoditas utama Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan laporan masih didominasi oleh komoditas karet mentah (35,64%), kayu lapis (27,57%) dan komoditas minyak kelapa sawit (9,80%). Pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit tercatat cukup signifikan didukung oleh perkembangan industri pengolahan hasil kelapa sawit di beberapa daerah seperti di Kabupaten induk Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Sementara itu, eksplorasi batu bara yang mulai dilakukan juga memberikan kontribusi positif pada kegiatan ekspor Propinsi Kalimantan Tengah.

Di sisi impor, komoditas pupuk tercatat menjadi komoditas terbesar dalam impor Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 30,07% disusul oleh barang-barang dari besi dan baja (14,61%) dan komoditas mesin/pesawat mekanik (12,46%). Kebutuhan akan pupuk diperkirakan akan meningkat di waktu mendatang seiring dengan perkembangan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan sub sektor tanaman bahan makanan.

INFLASI REGIONAL

Perkembangan harga di Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II-2006 dilihat dari indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun kalender (*year to date*) di dua kota utama yaitu Palangka Raya dan Sampit mengalami inflasi yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,87% (y-t-d). Inflasi di kota Palangka Raya sebesar

4,18 (y-t-d) atau sedikit lebih rendah dibanding inflasi kota Sampit yang sebesar 5,59% (y-t-d).

Jika dilihat dari pergerakan laju inflasi tahunan (*year-on-year*) triwulan II-2006 inflasi kota Palangka Raya tercatat sebesar 16,13% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 15,53% (y-o-y) akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahunan kota Sampit yang tercatat sebesar 17,35% (y-o-y).

Pada triwulan II-2006 ini, salah satu faktor pendorong inflasi yang cukup signifikan disamping biaya transportasi sebagai akibat kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005 adalah kenaikan harga kelompok bahan makanan khususnya beras karena faktor *supply* yang terganggu akibat kegagalan panen di beberapa daerah penghasil beras di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta beberapa daerah lain di Pulau Jawa.

PERKEMBANGAN PERBANKAN

Sampai dengan triwulan II-2006, perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi asset, dana pihak ketiga maupun kredit yang disalurkan. Asset perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp6.126,18 milyar, tumbuh 32,08% (Y-o-Y) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga perbankan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 40,51%(Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp5.160,66 milyar. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh DPK dalam bentuk giro yaitu sebesar 74,19% (Y-o-Y), diikuti oleh deposito 53,80% dan tabungan 8,07%. Pertumbuhan giro yang tinggi tersebut menyebabkan proporsi giro yang sebelumnya berada di posisi kedua setelah tabungan meningkat ke posisi pertama dengan proporsi sebesar 47,17% disusul tabungan 35,42% dan deposito 17,41%.

Kredit yang disalurkan perbankan Kalimantan Tengah tercatat sebesar 15,56% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp2.391,05 milyar. Dengan pertumbuhan DPK yang sebesar 40,51%, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan LDR jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Loans to deposit ratio pada triwulan laporan tercatat sebesar 46,33% sedangkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 56,33%.

Dilihat dari jenis penggunaannya, penyaluran kredit didominasi kredit konsumsi yaitu mencapai 41,39% dengan nilai sebesar Rp989,74 milyar disusul oleh investasi sebesar Rp718,02 milyar dan modal kerja Rp683,28 milyar. Berdasarkan sektor ekonomi, kredit sektor lainnya yang didalamnya termasuk kredit konsumsi tercatat sebesar Rp994,09 milyar atau 41,58% dari total kredit yang disalurkan. Sementara itu, sejalan dengan dominasi sektor pertanian dalam perekonomian, kredit kepada sektor pertanian berada pada peringkat kedua terbesar yaitu sebesar Rp623,16 milyar (26,06%) disusul oleh kredit kepada sektor perdagangan yaitu sebesar Rp427,94 milyar (17,90%).

Berdasarkan plafond kredit, kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp1.596,29 milyar atau 66,76% dari total kredit yang disalurkan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 15,84%. Proporsi terbesar dalam kredit kepada UMKM adalah kredit dengan plafond di bawah Rp50 juta (mikro) yaitu sebesar 55,91% disusul oleh kredit dengan plafond kredit Rp50 juta s.d. Rp500 juta (kecil) sebesar 24,07% dan kredit dengan plafond di atas Rp500juta s.d. Rp5 milyar sebesar 20,01%.

Berdasarkan Lokasi Proyek

Berdasarkan lokasi proyek, kredit yang disalurkan pada triwulan II-2006 (posisi bulan Mei 2006) mencapai sebesar Rp3.810,38milyar atau meningkat 9,48% (y-o-y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ditinjau dari jenis penggunaannya, kredit investasi tercatat mempunyai proporsi yang paling besar yaitu 41,82% dengan nilai Rp1.580,92 milyar disusul kredit modal kerja 30,50% dan kredit konsumsi 27,68%. Sementara itu, ditinjau dari sektor ekonomi, sektor pertanian menyerap kredit perbankan sebesar Rp1.682,89milyar atau sebesar 44,17% dari total kredit lokasi proyek disusul oleh sektor lainnya (27,65%) dan sektor industri

(10,63%). Dengan DPK sebesar Rp4.877,67milyar pada bulan Mei 2006, LDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 78,12%.

SISTEM PEMBAYARAN

Transaksi setoran uang masuk (*inflow*) Bank Indonesia pada triwulan laporan menunjukkan penurunan sebesar 18,99% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp108,51milyar. Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) mengalami kenaikan 30,15% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp701,54milyar sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp593,04milyar. Pada triwulan II-2006 jumlah PTTB uang kartal yang tidak layak edar mengalami penurunan sebesar 26,13% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan Rasio PPTB terhadap *inflow* sebesar 25,64%.

Transaksi non tunai perbankan Kalimantan Tengah yang meliputi kliring dan RTGS pada triwulan II-2006 meningkat Rp3.087,99milyar atau 88,45% (Y-o-Y) yaitu dari Rp3.489,91milyar pada triwulan II-2005 menjadi Rp6.576,90milyar. Transaksi kliring pada triwulan II-2006 tercatat sebanyak 18.042 lembar warkat dengan nilai transaksi sebesar Rp366,85 milyar. Pengiriman uang keluar Kalimantan Tengah melalui RTGS tercatat sebesar Rp3.032,54milyar sedangkan transaksi yang masuk melalui RTGS ke Kalimantan Tengah sebesar Rp3.177,50milyar. Dari transaksi RTGS, diketahui bahwa secara *netto* terdapat aliran dana non tunai masuk ke Kalimantan Tengah sebesar Rp144,96 milyar.

OUTLOOK PEREKONOMIAN REGIONAL

Laju pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Tengah yang cukup tinggi dalam 2 triwulan terakhir akan tetap berlanjut sampai dengan akhir tahun 2006 walaupun akan sedikit mengalami perlambatan pada triwulan III-2006 seiring dengan menurunnya sektor pertanian yang disebabkan karena faktor musiman. Sementara itu, MoU antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Departemen Koperasi & UKM dan Departemen Perindustrian mengenai pembangunan kawasan Industri Kecil

Menengah “Tumenggung Tilung” dalam jangka panjang akan dapat menggerakkan kembali sektor industri pengolahan berbasis kayu yang sempat mengalami kelesuan sejak dilakukannya penertiban *illegal logging* oleh Pemerintah Daerah.

Di sisi inflasi, tekanan inflasi dari sisi suply khususnya bahan makanan masih akan terjadi khususnya karena kegagalan panen di beberapa daerah di Kalimantan dan Jawa yang secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan pasokan bahan makanan di Kalimantan Tengah. Secara umum, tekanan dari sisi faktor distribusi barang akan jauh berkurang seiring dengan semakin lancarnya jalur distribusi Banjarmasin – Palangka Raya sejak diresmikannya jalan layang Tumbang Nusa. Dari kelompok komoditas yang lain, kelompok pendidikan diperkirakan akan mengalami tekanan karena melonjaknya permintaan sebagai dampak dari dimulainya tahun ajaran baru.

Di sisi perbankan, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan Kalimantan Tengah diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Stimulus kredit perbankan antara lain adalah proyek-proyek yang dibiayai APBD dan APBN pada tahun 2006. Percepatan realisasi APBD yang sampai dengan triwulan II-2006 realisasinya diketahui masih cukup rendah akan menjadi salah satu pendorong peningkatan kredit perbankan pada triwulan III dan IV 2006.

1

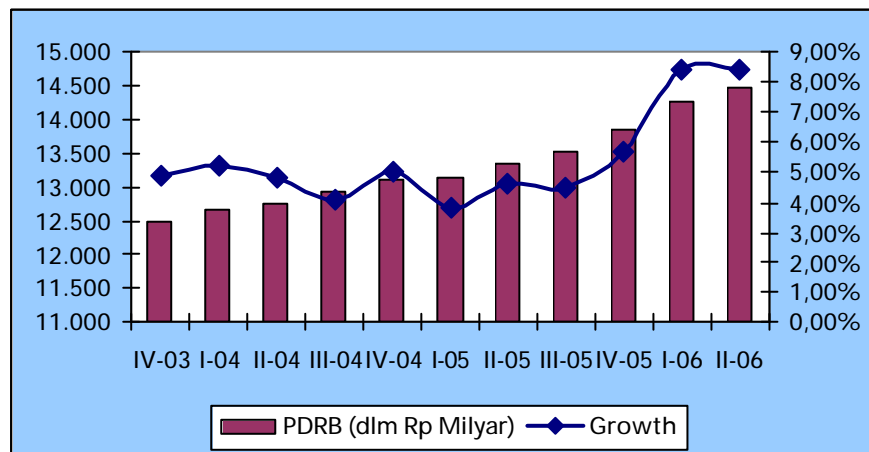
INDIKATOR KEGIATAN EKONOMI

1.1. KAJIAN UMUM

Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada triwulan II-2006 (*moving sum*) tercatat mengalami pertumbuhan positif (Y-o-Y) sebesar 8,42%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,65% dengan nilai sebesar Rp14.474,94 milyar.

Grafik 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Moving Sum)



Dari sisi produksi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor pertanian dalam arti luas yaitu sebesar 14,36% diikuti sektor pertambangan dan penggalian (9,87%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (9,85%).

Ditinjau dari sumbangan tiap-tiap sektor, sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi kontributor utama dalam perekonomian dengan

nilai sumbangan sebesar 45,97%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,65%) dan sektor jasa-jasa (11,96%).

Sementara itu, jika dilihat dari sisi jenis penggunaan, konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama dalam perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah. Konsumsi ini sebagian besar dipenuhi oleh barang-barang dari luar Propinsi Kalimantan Tengah yaitu antara lain dari Banjarmasin (Propinsi Kalimantan Selatan), Semarang dan Surabaya sehingga menyebabkan Propinsi Kalimantan Tengah mengalami net impor yang cukup besar.

Daerah penyumbang PDRB Propinsi Kalimantan Tengah terbesar adalah Kabupaten Kotawaringin Timur diikuti Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara Kota Palangka Raya berada di urutan ke 5 dari 6 kabupaten/kota induk Di Propinsi Kalteng.

1.2. SISI PRODUKSI

Perkembangan beberapa sektor ekonomi dalam PDRB Propinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Sektor Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Sektor Pertanian dalam arti luas mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,36% lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicatat pada periode yang sama tahun 2005 yang sebesar 6,08%. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada sub sektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 27,23% dan sub sektor perkebunan sebesar 25,01% walaupun sub sektor kehutanan tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,41%. Pertumbuhan negatif sub sektor kehutanan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kontribusi sub sektor ini pada perekonomian Kalimantan Tengah menjadi hanya sebesar 4,66% sementara kontribusi sub sektor perkebunan terus meningkat menjadi 24,66% pada periode laporan. *Share shifting* dua sub sektor inilah yang menyebabkan

pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas masih tercatat positif sampai dengan tahun 2006 ini.

Sementara itu, sub sektor perikanan pada periode laporan tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,46%. Turunnya produksi akibat musim hujan yang terus menerus dan kenaikan biaya produksi sehubungan dengan kenaikan harga BBM diperkirakan menjadi penyebab pertumbuhan yang negatif tersebut.

Tabel 1.1
Pertumbuhan dan Sumbangan Sektor Pertanian dalam Arti Luas Terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Tengah Triwulan II-2006

No.	Sub Sektor	Pertumbuhan Tw II-05	Pertumbuhan Tw II-06*)	Sumbangan thd Ekonomi Kalteng
1.	Tanaman Bahan Makanan	-8,38%	27,23%	7,48%
2.	Tanaman Perkebunan	21,34%	25,01%	24,66%
3.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	39,17%	2,66%	3,74%
4.	K e h u t a n a n	-33,58%	-13,41%	4,66%
5.	P e r i k a n a n	23,79%	-2,46%	5,44%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,91% (Y-o-Y). Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan sektor perbankan dan kegiatan jasa di Propinsi Kalimantan Tengah yang meningkat cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari 2,40% pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 2,41% pada periode laporan.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tercatat tumbuh sebesar 1,69% (Y-o-Y), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar 6,61%. Pertumbuhan yang melambat ini ditengarai karena ekspektasi konsumen yang terhadap harga

barang dan jasa dalam periode ini dirasakan masih terlalu tinggi sehingga mendorong masyarakat menunda melakukan pembelian barang-barang serta daya beli masyarakat yang cenderung melemah akibat inflasi yang cukup tinggi. Pertumbuhan yang melambat menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mengalami penurunan dari sebesar 18,82% pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 17,65% pada periode laporan.

Sektor Jasa-jasa.

Sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang melambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan angka pertumbuhan sebesar 3,42% dibanding periode yang sama tahun 2005 yang tercatat sebesar 3,87%. Sejalan dengan pertumbuhan yang melambat tersebut, kontribusi sektor ini juga mengalami penurunan dari sebesar 12,54% pada triwulan I-2005 menjadi 11,96% pada triwulan laporan.

Sektor Bangunan

Sektor bangunan juga mengalami pertumbuhan positif yang melambat pada triwulan laporan yaitu sebesar 6,85%, sementara pada triwulan yang sama tahun 2005 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,08%. Sejalan dengan pertumbuhan yang melambat tersebut, kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari sebesar 4,81% pada tahun 2005 menjadi 4,74% pada triwulan laporan. Pada periode laporan mendatang, diperkirakan sektor ini akan kembali mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi terkait dengan arah kebijakan jangka menengah pemerintah daerah yang menekankan pada pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,85% (Y-o-Y), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif 16,65%. Cukup tingginya pertumbuhan sektor ini dalam periode laporan lebih disebabkan karena stimulus semakin membaiknya jalur transportasi yang

menghubungkan antar daerah. Pertumbuhan sektor ini menyebabkan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari sebesar 7,48% pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 7,58% pada periode laporan.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Walaupun hanya mempunyai kontribusi sebesar 0,73% terhadap perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah, perkembangan sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,87%, sementara pada periode yang sama tahun 2005 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,85%. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan eksplorasi pasir sirkon dan batu bara di Propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.2
Pertumbuhan dan Sumbangan Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Tengah Triwulan II-2006*)

No.	Sub Sektor	Pertumbuhan Tw II-05	Pertumbuhan Tw II-06*)	Sumbangan
1.	Pertambangan Bukan migas	3,42%	4,74%	0,27%
2.	Penggalian	5,81%	13,22%	0,45%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

1.3. SISI PENGELUARAN (JENIS PENGGUNAAN)

Dari sisi pengeluaran, perekonomian regional Propinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh kegiatan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dengan kecenderungan kontribusi yang semakin meningkat dengan nilai total konsumsi berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp9.620,85 milyar pada periode laporan.

Tabel 1.3

Pertumbuhan dan Sumbangan PDRB menurut Jenis Penggunaan Propinsi Kalimantan Tengah Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sub Sektor	Kontribusi 2005	Kontribusi 2006*)	Pertumbuhan
1.	Konsumsi Rumah Tangga	50,99%	49,07%	4,34%
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,23%	1,20%	5,93%
3.	Konsumsi Pemerintah	17,11%	16,19%	2,64%
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,62%	35,51%	11,21%
5.	Perubahan Stok	5,14%	7,52%	58,52%
6.	Ekspor antar Daerah	33,28%	33,23%	8,27%
7.	Impor antar Daerah	-42,37%	-42,72%	9,33%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

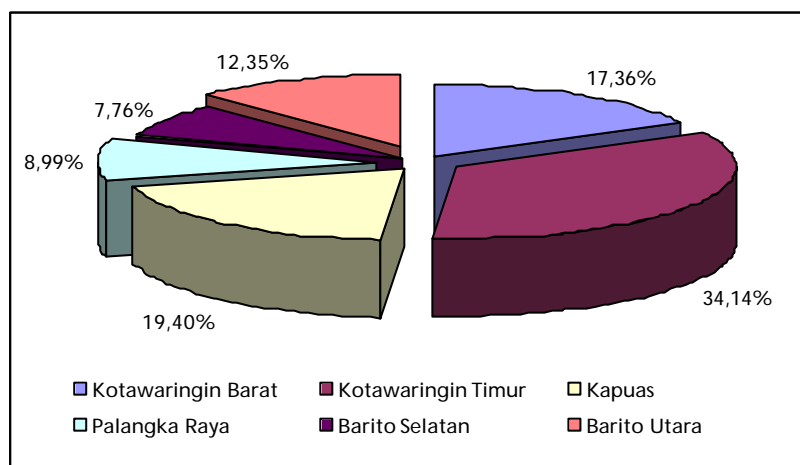
Sementara itu, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi juga meningkat dengan pertumbuhan sebesar 11,21% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp5.140,23 milyar pada periode laporan. Investasi ini diharapkan dapat semakin besar di tahun-tahun mendatang karena merupakan stimulus laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Di sisi ekspor impor antar daerah, pertumbuhan ekspor antar daerah Propinsi Kalimantan Tengah tercatat lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor antar daerah yang dilakukan yaitu masing-masing sebesar 8,27% dan 9,33%. Hal ini mengakibatkan kontribusi negatif net impor yang semakin besar terhadap PDRB yaitu dari sebesar 9,09% pada periode triwulan II-2005 menjadi 9,49% pada periode laporan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar porsi barang dan jasa konsumsi masyarakat yang didatangkan dari luar daerah daripada dihasilkan dari dalam Propinsi Kalimantan Tengah dan membawa dampak semakin banyak dana yang terserap ke luar daerah sebagai konsekuensi dari transaksi ekspor impor antar daerah tersebut.

1.4. KONTRIBUSI DAERAH TINGKAT II

Ditinjau dari kontribusi daerah tingkat II, Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 34,14% disusul oleh Kabupaten Kapuas (19,40%), Kabupaten Kotawaringin Barat (17,36%),

Kabupaten Barito Utara (12,35%), Kota Palangka Raya (8,99%) dan yang terkecil adalah Kabupaten Barito Selatan yaitu sebesar 7,76%.

Grafik 1.2
Kontribusi Daerah dalam PDRB Propinsi Kalimantan Tengah



Secara umum tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap sektor-sektor utama pembentuk PDRB di masing-masing kota/kabupaten pada triwulan laporan. Uraian singkat mengenai pertumbuhan ekonomi masing-masing kota/kabupaten adalah sebagai berikut :

Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya pada triwulan laporan mencatat pertumbuhan sebesar 5,16% (Y-o-Y) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp1.092,45 milyar (*moving sum*). Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan positif sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Palangka Raya terutama sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 13,66% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,47%. Dalam periode laporan, tercatat 2 sektor ekonomi yang

mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor jasa-jasa sebesar 0,11%, sektor pertanian dalam arti luas sebesar 3,72%. Lima sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Palangka Raya tampak dalam tabel 1.4. di bawah ini.

Tabel 1.4
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan Kota Palangka Raya
Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Jasa-jasa	-0,11%	28,26%
2.	Pengangkutan dan Komunikasi	13,66%	24,12%
3.	Perdagangan, hotel dan Restoran	5,47%	18,65%
4.	Bangunan	9,69%	8,38%
5.	Pertanian dalam arti luas	-3,72%	7,77%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode laporan mencatat pertumbuhan positif 5,33% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp4.012,51milyar. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 23,14% disusul sektor pertanian dalam arti luas sebesar 6,96%. Sub sektor perkebunan mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 22,57%. Pertumbuhan sub sektor ini pada akhirnya akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri pengolahan di daerah khususnya industri pengolahan berbasis hasil perkebunan. Dalam periode laporan, terdapat satu sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,28%.

Tabel 1.5
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan
Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Pertanian dalam arti luas	6,96%	46,32%
2.	Perdagangan, hotel dan Restoran	1,47%	17,86%
3.	Industri Pengolahan	5,28%	12,64%
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,43%	10,91%
5.	Jasa-jasa	2,89%	6,84%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat pertumbuhan sebesar 4,39% dengan nilai sebesar Rp2.556,53milyar. Dalam periode laporan, semua sektor ekonomi tercatat mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 20,79% diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,98% dan sektor industri pengolahan 7,13%. Sementara sektor ekonomi yang paling dominan yaitu sektor pertanian dalam arti luas tumbuh sebesar 3,10%. Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup rendah ini didorong oleh pertumbuhan negatif pada tiga sub sektor ekonomi yaitu peternakan, kehutanan dan perikanan. Meskipun demikian, sektor pertanian masih menjadi kontributor utama perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 52,95% disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 16,95% dan sektor industri pengolahan sebesar 11,89%.

Tabel 1.6
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan
Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Pertanian dalam arti luas	3,10%	52,95%
2.	Perdagangan, hotel dan Restoran	1,26%	16,95%
3.	Industri Pengolahan	7,13%	11,89%
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	14,98%	7,02%
5.	Jasa-jasa	4,81%	5,63%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas mencatat pertumbuhan sebesar 5,01% (Y-o-Y) pada periode laporan dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp2.810,44milyar. Semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,88% (y-o-y) disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 8,67%. Dalam periode laporan, sektor utama di Kabupaten Kapuas yaitu sektor pertanian dalam arti luas yang menyumbang PDRB daerah sebesar 52,87% hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,46%. Pertumbuhan yang relatif rendah ini disebabkan karena kegagalan panen sebagai akibat musim yang secara umum terjadi di seluruh wilayah Kalimantan.

Tabel 1.7
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan
Kabupaten Kapuas Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Pertanian dalam arti luas	0,46%	52,87%
2.	Perdagangan, hotel dan Restoran	20,88%	18,83%
3.	Bangunan	5,04%	7,57%
4.	Jasa-jasa	0,36%	6,44%
5.	Industri Pengolahan	8,67%	6,28%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara mencatat pertumbuhan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 10,57% (Y-o-Y) dengan nilai PDRB sebesar Rp1.649,04milyar. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini didorong oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh sektor pertambangan yaitu sebesar 21,64%. Sektor ekonomi utama yaitu sektor pertanian dalam arti luas tercatat mengalami pertumbuhan 6,18%. Berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, sub sektor kehutanan yang masih menjadi sub sektor andalan mencatat pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar 8,50%.

Tabel 1.8
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan Kabupaten Barito Utara
Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Pertanian dalam arti luas	6,18%	36,20%
2.	Perdagangan, hotel dan Restoran	9,12%	20,18%
3.	Pertambangan dan Penggalian	21,64%	18,15%
4.	Jasa-jasa	8,09%	7,11%
5.	Pengangkutan dan komunikasi	14,76%	6,52%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

Kabupaten Barito Selatan

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada periode laporan tercatat paling kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya sebesar 2,97% (Y-o-Y) dengan nilai PDRB sebesar Rp1.185,24 milyar. Sektor yang paling dominan yaitu sektor pertanian dalam arti luas tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,24%. Pertumbuhan yang relatif kecil ini terutama disebabkan karena menurunnya sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 19,32% akibat kegagalan panen yang dialami di sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan. Pertumbuhan negatif juga

dicatat sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,58% dan sektor jasa-jasa sebesar 0,07%.

Tabel 1.9
Pertumbuhan 5 Sektor Ekonomi Dominan
Kabupaten Barito Selatan Triwulan II-2006*) (Moving Sum)

No.	Sektor	Pertumbuhan	Share
1.	Pertanian dalam arti luas	2,24%	46,78%
2.	Perdagangan, hotel dan Restoran	1,24%	13,37%
3.	Pengangkutan dan Komunikasi	13,51%	10,92%
4.	Jasa-jasa	-0,07%	10,26%
5.	Bangunan	1,25%	8,59%

Sumber : BPS Propinsi Kalteng

*) angka sementara

1.5. Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II-2006 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mencapai realisasi sebesar Rp443,21milyar atau sebesar 55,12% dari rencana penerimaan tahun 2006. Bagian laba BUMD tercatat menunjukkan realisasi yang melebihi perencanaan yaitu Rp6,64milyar atau 115,59% dari rencana. Persentase realisasi penerimaan terkecil dicatat oleh penerimaan dari retribusi yang baru terealisasi sebesar 31,16%.

Berbeda dengan pendapatan/penerimaan daerah, realisasi belanja daerah baru mencapai 23,33% dari yang direncanakan. Dengan lebih rendahnya persentase realisasi belanja tersebut, keuangan daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II-2006 menunjukkan surplus Rp259,31milyar.

Tabel 1.10
Realisasi APBD Propinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Anggaran 2006	Realisasi s.d. Twil-2006	% Realisasi
A	Pendapatan			
1.	Bag. Pendapatan Asli Daerah	172.590,00	93.315,44	54,07%
	A. Pajak Daerah	150.395,00	77.387,04	51,46%
	B. Retribusi daerah	10.305,00	3.211,47	31,16%
	C. Bagian laba BUMD	5.750,00	6.646,25	115,59%
	D. Penerimaan lain-lain	6.140,00	6.070,68	98,87%
2.	Bagian Dana Perimbangan	631.500,00	349.895,96	55,41%
	A. Bagi hasil pajak/bukan pajak SDA	79.500,00	27.895,96	35,09%
	B. Dana Alokasi Umum (DAU)	552.000,00	322.000,00	58,33%
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah			
	A. Penerimaan lain-lain			
	B. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan			
	Jumlah Pendapatan	804.090,00	443.211,40	55,12%
B.	Belanja			
1.	Aparatur Daerah	293.666,38	86.211,39	29,36%
	A. Belanja Administrasi Umum	210.644,47	69.222,73	32,86%
	B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	46.312,35	5.811,53	12,55%
	C. Belanja Modal	36.709,55	11.177,13	30,45%
2.	Pelayanan Publik	346.183,48	72.534,11	20,95%
	A. Belanja Administrasi Umum	12.816,05	1.984,10	15,48%
	B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	49.036,57	6.269,09	12,78%
	C. Belanja Modal /Pembangunan	284.330,86	64.281,21	22,61%
3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	124.618,14	24.132,71	19,37%
4.	Belanja Tidak Tersangka	23.622,01	1.017,20	4,31%
	Jumlah Belanja	788.090,00	183.895,70	23,33%
	Surplus (defisit)	16.000,00	259.315,71	

1.6. PMA dan PMDN

Realisasi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan laporan tercatat masih cukup rendah. Realisasi PMA sampai dengan triwulan laporan hanya mencapai sebesar 21,53% sedangkan realisasi PMDN sebesar 58,20%.

Tabel 1.11

Realisasi PMA dan PMDN Propinsi Kalimantan Tengah

PMA dlm USD ribu, PMDN dlm RP juta

No.	Sektor Ekonomi	Persetujuan Investasi		Realisasi Investasi	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN
1.	Pertanian				
	a. Tanaman bahan Makanan				
	b. Tanaman Perkebunan	717.605	10.306.352	498.776	4.080.913
	c. Peternakan dan hasil-hasilnya				
	d. Kehutanan	257.920	3.392.818	105.915	3.520.814
	e. Perikanan	275	11.377		6.406
2.	Pertambangan	2.470.271	174.862	770.236	7.164
3.	Industri	2.186.774	7.725.371	887.951	5.180.428
4.	Listrik, gas, air bersih	-	-		
5.	Bangunan	400.000	16.000		520
6.	Perdagangan, hotel, restoran	-	-		
7.	Pengangkutan dan komunikasi	-	17.593		135
8.	Keuangan, persewaan & jasa perush	-	-		
9.	Jasa – jasa	4.540.642	644.385	13.898	175.434
	Total	10.573.487	22.288.758	2.276.776	12.971.814

Sumber : BPMD Propinsi Kalteng, diolah

Sementara itu, sektor industri yang didalamnya termasuk industri pengolahan, sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan masih menjadi daya tarik utama bagi investor dalam menanamkan modalnya di Propinsi Kalimantan Tengah. Seiring dengan prospek perkembangan sub sektor perkebunan yang diperkirakan cukup tinggi pada masa-masa yang akan datang, sektor industri pengolahan hasil perkebunan diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi daya tarik yang kuat bagi investor.

1.7. PERDAGANGAN LUAR NEGERI (EKSPOR-IMPOR)

Ekspor komoditas utama Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan laporan masih didominasi oleh komoditas karet mentah, sintetis dan pugaran serta barang-barang kayu dan gabus. Disamping itu, komoditas minyak kelapa sawit terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh perkembangan industri pengolahan hasil kelapa sawit di beberapa daerah seperti di Kabupaten induk Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur yang cukup signifikan. Sementara itu, eksplorasi batu bara yang mulai dilakukan juga memberikan kontribusi positif pada kegiatan ekspor Propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.12
Ekspor Komoditas Utama Propinsi Kalimantan Tengah

(Ribu USD)

KETERANGAN		Tahun 2004	Tahun 2005	Trw I-06	Trw II-06*)
1.	Getah Karet	64.042,46	94.673,91	34.689,62	-
2.	Kayu Lapis	16.124,82	73.713,22	15.129,96	13.101,44
3.	Minyak Kelapa Sawit	25.779,05	26.036,96	24.352,74	9.907,00
4.	Kayu Olahan Lainnya	4.093,62	17.962,70	3.440,21	1.274,49
5.	Batubara	1.580,44	7.252,87	2.418,20	4.342,43
6.	Kayu Gergajian	772,71	2.845,82	435,09	495,41
7.	Pertanian lainnya	1.927,52	2.796,47	708,97	946,91
8.	Ikan Olahan	2.074,00	1.835,49	601,85	151,32
9.	Pasir alam	23,74	941,79	4.853,94	896,01
10.	Hasil tambang lainnya	74,53	166,89	150,00	559,72
11.	Lainnya	10.317,36	39.543,33	2.914,98	-
TOTAL		124.191,77	265.636,12	89.695,56	25.493,33

*) Bulan April 2006

Di sisi impor, komoditas pupuk tercatat menjadi komoditas terbesar dalam impor Propinsi Kalimantan Tengah disamping komoditas mesin/pesawat mekanik dan komoditas kendaraan serta bagian-bagiannya. Kebutuhan akan pupuk diperkirakan akan meningkat di waktu mendatang seiring dengan perkembangan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan sub sektor tanaman bahan makanan.

Tabel 1.13
Impor Komoditas Utama Propinsi Kalimantan Tengah

(Ribu USD)

KETERANGAN		Tahun 2004	Tahun 2005	Trw I-06	Tw II-06*)
1.	Pupuk	2.473,03	3.172,22	1.307,96	87,30
2.	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	3.451,70	1.314,59	3.077,56	169,85
3.	Biji-bijian berminyak	42,63	344,07	-	-
4.	Benda-benda dari besi dan baja	62,39	1.542,02	25,95	-
5.	Kendaraan dan bagiannya	363,74	257,79	-	-
6.	Gula dan kembang gula	3.337,08	1.138,51	-	-
7.	Lainnya	516,48	2.781,73	95,04	-
TOTAL		10.247,03	10.550,91	4.506,51	257,15

*) Bulan April 2006

Ditinjau dari negara tujuan ekspor komoditas, sejak tahun 2004, Jepang, Amerika Serikat, RRC dan Singapura menjadi negara utama tujuan ekspor komoditas yang berasal dari Propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.14
Negara Pembeli Ekspor

(Ribu USD)

KETERANGAN		Tahun 2004	Tahun 2005	Trw I-06	Tw II-06*)
1.	Singapura	64.558,72	4.156,44	684,07	1.012,63
2.	Jepang	7.116,35	36.680,35	12.271,54	2.931,61
3.	Korea Selatan	15.900,93	14.416,54	2.613,63	1.085,79
4.	Amerika Serikat	4.677,28	43.082,04	10.247,37	3.838,25
5.	RRC	13.272,72	47.758,74	21.812,13	-
6.	Belgia	3.690,92	6.128,14	811,53	35,80
7.	Lainnya	14.974,85	113.413,87	41.255,29	16.589,26
TOTAL		124.191,77	265.636,12	89.695,56	25.493,33

*) Bulan April 2006

Sementara negara asal komoditas yang diimpor Propinsi Kalimantan Tengah sebagian besar berasal dari Malaysia dan Singapura.

Tabel 1.15
Negara Asal Impor

(Ribu USD)

KETERANGAN		Tahun 2004	Tahun 2005	Trw I-06	Tw II-06*)
1.	Malaysia	6.528,75	5.266,25	3.534,35	85,85
2.	Korea Selatan	1,88	1.792,57	-	-
3.	RRC	-	71,76	-	-
4.	Singapura	3.673,78	83,32	207,76	-
5.	Negara Asia Lainnya	42,63	344,07	0,00	0,00
6.	Lainnya	-	2.992,93	764,40	171,30
TOTAL		10.247,03	10.550,90	4.506,51	257,15

*) Bulan April 2006

2.1. KAJIAN UMUM

Perkembangan harga di Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II-2006 dilihat dari indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun kalender (*year to date; y-t-d*) di dua kota utama yaitu Palangka Raya dan Sampit mengalami inflasi yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,87% (*y-t-d*). Inflasi di kota Palangka Raya tercatat sebesar 4,18 (*y-t-d*) atau sedikit lebih rendah dibanding inflasi kota Sampit yang sebesar 5,59% (*y-t-d*).

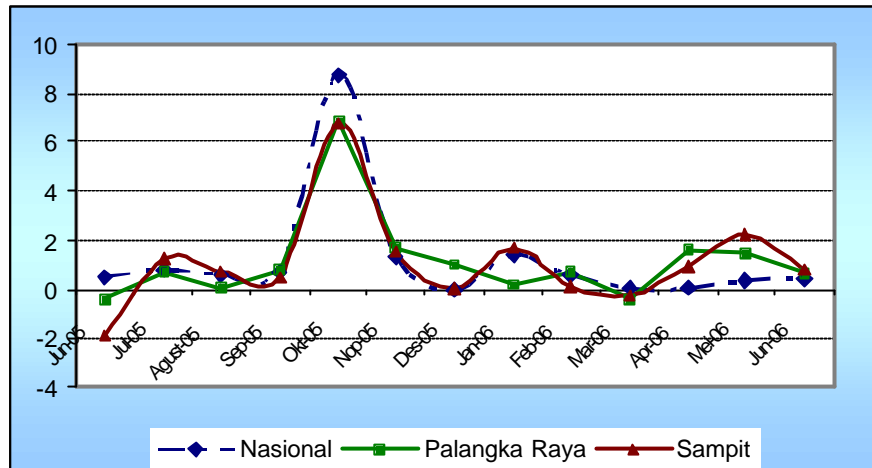
Jika dilihat dari pergerakan laju inflasi tahunan (*year-on-year*) sampai dengan bulan Juni 2006 (triwulan II-2006) inflasi kota Palangka Raya tercatat sebesar 16,13% (*y-o-y*) lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 15,53% (*y-o-y*). Sementara itu, perkembangan laju inflasi tahunan kota Sampit pada triwulan II-2006 tercatat sebesar 17,35% (*y-o-y*), mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 11,76%. Relatif tingginya inflasi di Palangka Raya dan Sampit ini didorong oleh kenaikan harga yang signifikan pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan akibat kenaikan harga BBM dan kelompok bahan makanan khususnya beras sebagai akibat terganggunya suply barang yang disebabkan karena terganggunya produksi di berbagai daerah dan terganggunya jalur transportasi Banjarmasin – Palangka Raya karena penyelesaian pekerjaan pembangunan jalan layang Tumbang Nusa.

Pada grafik 2.1 berikut terlihat bahwa pergerakan inflasi kota Palangka Raya dan Sampit mempunyai kesamaan pola. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat di kedua kota tersebut tidak jauh berbeda. Tingkat inflasi Kota Sampit yang relatif lebih tinggi dibanding Palangka Raya menunjukkan bahwa faktor tekanan inflasi di kota Sampit dari sisi distribusi lebih besar. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian barang kebutuhan masyarakat kota Sampit juga berasal dari

Banjarmasin yang harus melalui jalur transportasi trans Kalimantan dengan jarak yang lebih jauh dibanding Palangka Raya.

Grafik 2.1.

Pergerakan Inflasi Bulanan (m-t-m)



Sumber : BPS,

2.2. INFLASI KOTA PALANGKA RAYA

a. Inflasi Tahunan (y-o-y)

Laju inflasi Palangka Raya pada triwulan II-2006 masih dipengaruhi oleh tingginya indeks harga kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang tercatat sebesar 26,78% (y-o-y). Indeks harga yang cukup tinggi juga terjadi pada kelompok bahan makanan yang tercatat sebesar 26,75%.

Dari tujuh kelompok barang, kelompok kesehatan mengalami kenaikan indeks harga terendah yaitu 2,19% disusul oleh kelompok pendidikan sebesar 4,09%. Hal ini disebabkan karena tekanan permintaan pada kedua kelompok barang dimaksud pada awal tahun cukup rendah.

Dilihat dari sumbangannya, kelompok transportasi yang mengalami inflasi paling besar tapi bukan penyumbang inflasi terbesar di Palangka Raya karena bobot kelompok transportasi relatif kecil. Sementara itu, kelompok bahan makanan yang mempunyai bobot paling besar memberikan sumbangan terhadap inflasi paling besar yaitu 7,52%. Dilain

pihak kelompok kesehatan tercatat menjadi penyumbang inflasi terkecil yaitu sebesar 0,09% disusul oleh kelompok pendidikan sebesar 0,20%.

Tabel 2.1.

Inflasi (y-o-y) Palangka Raya Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	Tw III-05		Tw IV-05		Tw I-06		Tw II-06	
	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb
UMUM	5,26	5,26	12,12	12,12	10,98	10,98	16,13	16,13
Bahan makanan	5,40	1,53	7,91	2,35	9,39	2,71	26,75	7,52
Mkn jd,minuman, rokok & tembakau	4,62	0,95	7,37	1,49	7,28	1,47	7,75	1,58
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	4,49	1,02	14,00	3,12	11,63	2,61	10,86	2,47
Sandang	7,04	0,43	7,33	0,45	9,01	0,55	10,69	0,66
Kesehatan	2,09	0,09	2,01	0,08	1,55	0,06	2,19	0,09
Pendidikan, Rekreasi & OR	3,35	0,17	3,47	0,17	3,60	0,17	4,08	0,20
Transportasi, Komunikasi & Jasa	8,20	1,07	35,34	4,46	25,29	3,40	26,78	3,60

Jika ditinjau dari komoditasnya, komoditas bahan bakar (minyak tanah, solar dan bensin) tercatat berada dalam 10 komoditas yang mengalami kenaikan IHK tertinggi disamping beberapa komoditas lain yaitu cabe rawit, beras, seragam sekolah dan sebagainya (tabel 2.2). Sementara itu beberapa komoditas hasil pertanian lain seperti nanas, jeruk nipis, kangkung, pepaya, daun katuk dan sawi hijau berada dalam 10 komoditas yang mengalami penurunan IHK terbesar. Hal ini disebabkan karena komoditas-komoditas dimaksud sebagian besar dapat dihasilkan di sekitar Kota Palangka Raya sehingga tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kenaikan BBM dan biaya transportasi.

Tabel 2.2.**Dua Puluh Komoditas yang Mengalami Perubahan IHK Terbesar (y-o-y)**

10 Komoditas yg mengalami kenaikan IHK tertinggi (Y-o-Y)			10 Komoditas yg mengalami Penurunan IHK Terbesar (Y-o-Y)		
No.	Komoditas	Perubahan IHK	No.	Komoditas	Perubahan IHK
1.	Minyak Tanah	123,02%	1.	Nanas	-36,13%
2.	Solar	104,76%	2.	Gabus	-19,58%
3.	Cabe Rawit	100,93%	3.	Jeruk Nipis/Limau	-16,67%
4.	Bensin	87,50%	4.	Seng	-13,44%
5.	Beras	81,94%	5.	Kangkung	-9,09%
6.	Seragam Sekolah Anak	71,43%	6.	Pepaya	-7,69%
7.	Rimbang/Tekokak	71,43%	7.	Daun Katuk	-5,88%
8.	Angkutan Dalam Kota	66,67%	8.	Keramik	-3,03%
9.	Donat	66,67%	9.	Emping Mentah	-2,00%
10.	Umbut Rotan	63,64%	10.	Sawi Hijau	-1,54%

b. Inflasi Triwulanan (q-t-q)

Dilihat secara triwulanan (q-t-q), pada triwulan II-2006 kota Palangka Raya mengalami inflasi sebesar 3,68% atau mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,48%. Jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I-2006, maka pada triwulan laporan semua kelompok barang mengalami peningkatan. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi paling tinggi dengan nilai sebesar 11,79% disusul oleh kelompok sandang dengan nilai sebesar 2,42%.

Dilihat dari sumbangannya maka sumbangan kelompok bahan makanan menempati urutan pertama dengan sumbangan terhadap inflasi umum sebesar 3,35%. Penyumbang terbesar kedua adalah kelompok sandang yang menyumbang inflasi 0,14% terhadap inflasi total. Tingginya sumbangan inflasi terjadi pada kelompok bahan makanan terutama terjadi pada komoditas beras karena kegagalan panen di beberapa daerah dan akibat terganggunya distribusi pada bulan April dan Mei 2006 akibat dibatasinya operasi truk-truk besar pengangkut barang yang melalui jalan Tumbang Nusa yang sedang dalam proses penyelesaian. Sementara itu

pada kelompok sandang komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya harga sandang anak-anak dan sandang pribadi dan perhiasan.

Tabel 2.3.

Inflasi (q-t-q) Palangka Raya Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	Tw III-05		Tw IV-05		Tw I-06		Tw II-06	
	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb
UMUM	1.59	1.59	9,72	9,72	0,48	0,48	3,68	3,68
Bahan makanan	2.47	0.70	10,64	3,02	0,00	0,00	11,79	3,35
Mkn jd,minuman, rokok & tembakau	1.57	0.32	3,98	0,81	1,41	0,27	0,61	0,12
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	0.60	0.14	10,17	2,29	0,15	0,03	-0,11	-0,03
Sandang	2.72	0.17	2,86	0,18	2,29	0,13	2,42	0,14
Kesehatan	0.05	0.00	0,58	0,02	0,55	0,02	0,98	0,04
Pendidikan, Rekreasi & OR	2.47	0.12	0,87	0,04	0,21	0,01	0,47	0,02
Transportasi, Komunikasi & Jasa	1.07	0.14	25,08	3,35	0,07	0,01	0,22	0,03

Dibandingkan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya, hampir semua kelompok barang mengalami inflasi, bahkan semakin besar laju inflasinya tetapi pada kelompok perumahan justru terjadi deflasi yaitu sebesar 0,11%. Besarnya inflasi triwulanan dan sumbangan masing-masing kelompok barang secara rinci terdapat pada tabel 2.3.

Jika diamati pada tiap-tiap komoditas, berbeda dengan pergerakan IHK secara tahunan, secara triwulanan komoditas BBM (minyak tanah, solar dan bensin) dan biaya transportasi tidak berada dalam 10 komoditas yang mengalami kenaikan IHK tertinggi. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan IHK tertinggi tercatat merupakan komoditas yang banyak didatangkan dari daerah lain seperti bawang putih, beras, daging ayam ras dan tongkol disamping komoditas yang secara musiman mengalami kenaikan di akhir triwulan II yaitu seragam anak sekolah dan pulpen/ballpoint.

Tabel 2.4.
Dua Puluh Komoditas yang Mengalami Perubahan IHK Terbesar (q-t-q)

10 Komoditas yg mengalami kenaikan IHK tertinggi (q-t-q)			10 Komoditas yg mengalami Penurunan IHK Terbesar (q-t-q)		
No.	Komoditas	Perubahan IHK	No.	Komoditas	Perubahan IHK
1.	Bawang Putih	52,38%	1.	Cabe Merah	-25,82%
2.	Beras	40,77%	2.	Gabus	-14,82%
3.	Pulpen/Bollpoint	33,33%	3.	Daun Katuk	-13,51%
4.	Daging Ayam Ras	30,84%	4.	Sawi Hijau	-13,51%
5.	Seragam Sekolah Anak	20,00%	5.	Sepat	-12,50%
6.	Kacang Panjang	19,05%	6.	Udang Basah	-10,76%
7.	Tongkol	18,75%	7.	Semen	-10,01%
8.	Oyong/Gambas	18,65%	8.	Umbut Rotan	-10,00%
9.	Tapah	18,42%	9.	Jagung Muda	-8,32%
10.	Baung	18,42%	10.	Garam	-7,41%

2.3. INFLASI KOTA SAMPIT

a. Inflasi Tahunan (y-o-y)

Laju inflasi Sampit pada triwulan II-2006 masih dipengaruhi oleh tingginya indeks harga kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar yaitu sebesar 24,26% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 23,77% (y-o-y). Sementara itu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tercatat paling kecil mengalami inflasi yaitu sebesar 6,25%.

Ditinjau dari sumbangannya, kelompok bahan makanan menempati urutan pertama dengan sumbangan sebesar 8,01% meskipun laju inflasinya menempati urutan ketiga. Sumbangan terbesar kedua berasal dari kelompok perumahan yang mengalami inflasi yang cukup tinggi dengan sumbangannya tercatat sebesar 4,69%. Sumbangan yang cukup besar lainnya berasal dari kelompok transportasi sebesar 1,99%. Dengan demikian secara total inflasi tahunan Sampit pada triwulan II-2006 adalah sebesar 17,35%.

Tabel 2.5.
Perkembangan Inflasi (y-o-y) Sampit
Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	Tw III-05		Tw IV-05		Tw I-06		Tw II-06	
	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb
UMUM	6.36	6.36	11.90	11.90	11,76	11,76	17,35	17,35
Bahan makanan	7.02	2.86	10.50	4.35	11,58	4,80	19,64	8,01
Mkn jd,minuman, rokok & tembakau	10.71	1.93	5.56	1.02	5,88	1,07	9,04	1,66
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	2.30	0.46	16.22	3.13	15,89	3,04	24,26	4,69
Sandang	4.84	0.31	3.61	0.23	4,25	0,27	7,14	0,45
Kesehatan	1.97	0.07	8.42	0.30	9,60	0,34	9,57	0,35
Pendidikan, Rekreasi & OR	0.80	0.03	6.58	0.21	6,25	0,20	6,25	0,20
Transportasi, Komunikasi & Jasa	8.68	0.69	34.14	2.65	24,93	2,05	23,77	1,99

Dilihat dari perubahan harga per komoditas, sedikit berbeda dengan Kota Palangka Raya komoditas beras tercatat tidak menjadi salah satu dari 10 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi. Meskipun demikian, sebagian besar komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi masih serupa yaitu BBM (minyak tanah, solar dan bensin) serta komoditas yang didatangkan dari luar daerah/pulau yaitu cabe rawit, cabe merah dan bawang putih. Sementara itu, pasokan hasil perkebunan yang cukup menyebabkan beberapa komoditas hasil perkebunan seperti jeruk, semangka, ketimun dan pepaya mengalami penurunan IHK secara cukup signifikan.

Tabel 2.6.**Dua Puluh Komoditas yang Mengalami Perubahan IHK Terbesar (y-o-y)**

10 Komoditas yg mengalami kenaikan IHK tertinggi (Y-o-Y)			10 Komoditas yg mengalami Penurunan IHK Terbesar (Y-o-Y)		
No.	Komoditas	Perubahan IHK	No.	Komoditas	Perubahan IHK
1.	Cabe Rawit	219,98%	1.	Jeruk	-42,68%
2.	Minyak Tanah	149,97%	2.	Semangka	-23,03%
3.	Cabe Merah	115,39%	3.	Bandeng	-21,16%
4.	Solar	104,77%	4.	Tongkol	-16,67%
5.	Ketela Pohon/Singkong	100,00%	5.	Patin	-11,11%
6.	Jagung Muda	88,90%	6.	Ketimun	-8,33%
7.	Bensin	87,50%	7.	Lais	-6,45%
8.	SLTA	74,17%	8.	Pepaya	-6,25%
9.	Bawang Putih	71,21%	9.	Daun Bawang	-6,25%
10.	Korek Api Kayu	69,34%	10.	Telepon Seluler	-5,71%

b. Inflasi Triwulanan (q-t-q)

Ditinjau secara triwulanan (q-t-q), pada triwulan II-2006 kota Sampit mengalami inflasi sebesar 3,94%, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada triwulan laporan terdapat inflasi yang cukup besar khususnya pada kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan, air, listrik yang masing-masing sebesar 4,39% dan 7,49%. Meskipun demikian, ditinjau dari sumbangannya, kelompok bahan makanan menjadi penyumbang inflasi tertinggi yaitu sebesar 1,82%, disusul oleh kelompok perumahan (1,48%) dan kelompok makanan jadi (0,44%).

Tabel 2.7.**Perkembangan Inflasi (q-t-q) Sampit Menurut Kelompok Pengeluaran**

Kelompok	Tw III-05		Tw IV-05		Tw I-06		Tw II-06	
	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb	Inflasi	Sumb
UMUM	2.48	2.48	8,45	8,45	1,59	1,59	3,94	3,94
Bahan makanan	3.07	1.25	8,18	3,35	2,79	1,14	4,39	1,82
Mkn jd,minuman, rokok & tembakau	4.88	0.90	-	-	1,36	0,23	2,57	0,44
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	1.04	0.20	14,01	2,67	0,35	0,07	7,49	1,48
Sandang	1.30	0.08	1,82	0,11	1,00	0,06	2,84	0,17

Kesehatan	0.39	0.01	6,16	0,21	1,99	0,07	0,81	0,03
Pendidikan, Rekreasi & OR	1.05	0.03	5,13	0,16	0,01	0,00	0,00	0,00
Transportasi, Komunikasi & Jasa	-0.06	-0.00	23,65	1,93	0,15	0,01	0,00	0,00

Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, semua kelompok barang mengalami peningkatan inflasi, kecuali kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan kelompok transportasi yang terlihat mengalami penurunan inflasi. Sementara jika diamati pada tiap komoditas, perubahan IHK tertinggi dicatat oleh komoditas hasil pertanian disamping komoditas minyak tanah dan emas perhiasan. Khusus untuk komoditas minyak tanah, kelangkaan minyak tanah dalam beberapa bulan terakhir ditengarai menjadi pemicu kenaikan IHK minyak tanah secara signifikan dalam triwulan terakhir.

Tabel 2.8.

Dua Puluh Komoditas yang Mengalami Perubahan IHK Terbesar (q-t-q)

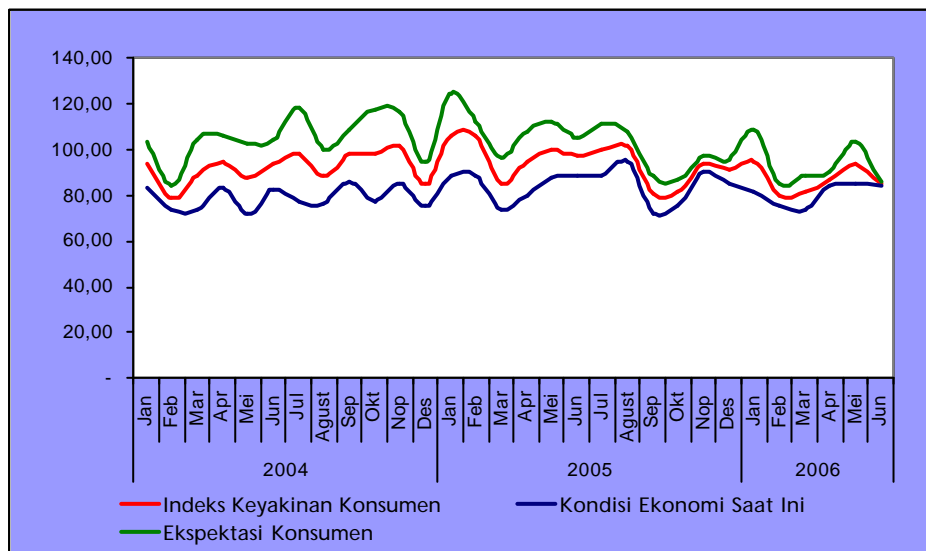
10 Komoditas yg mengalami kenaikan IHK tertinggi (q-t-q)			10 Komoditas yg mengalami Penurunan IHK Terbesar (q-t-q)		
No.	Komoditas	Perubahan IHK	No.	Komoditas	Perubahan IHK
1.	Ketela		1.	Daun Bawang	-23,08%
2.	Pohon/Singkong	100,00%	2.	Batu Bata/Batu Tala	-19,64%
3.	Jagung Muda	88,90%	3.	Semangka	-18,37%
4.	Cabe Rawit	76,47%	4.	Patin	-17,24%
5.	Bawang Putih	52,70%	5.	Tenggiri	-16,90%
6.	Tomat Buah	50,01%	6.	Bandeng	-10,87%
7.	Rimbang/Tekokak	46,15%	7.	Terong Panjang	-10,34%
8.	Minyak Tanah	33,94%	8.	Gabus	-9,17%
9.	Bayam	30,76%	9.	Tongkol	-5,66%
10.	Cabe Merah	25,64%	10.	Wortel	-5,26%
	Emas Perhiasan	24,65%			

BOKS

SURVEI KONSUMEN

Keyakinan Masyarakat

Hasil survei konsumen dalam triwulan II-2006 menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan 6 s.d. 12 bulan yang akan datang masih berfluktuasi pada tingkat pesimis (di bawah level 100). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami kecenderungan meningkat terutama di bulan Mei 2006 dengan angka indeks berada pada tingkat optimis sebesar 103,33. Sementara itu, IKK rata-rata dalam triwulan laporan tercatat sebesar 88,67, naik 3,28 poin dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 85,39. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap perekonomian dalam 6 s.d. 12 bulan mendatang tercatat masih berada pada level pesimis (93,22) dan mengalami penurunan sebesar 1,00 poin dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 94,22. Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini walaupun masih berada pada level pesimis dengan angka indeks 84,11 namun mengalami perbaikan 7,56 poin dibandingkan triwulan sebelumnya.

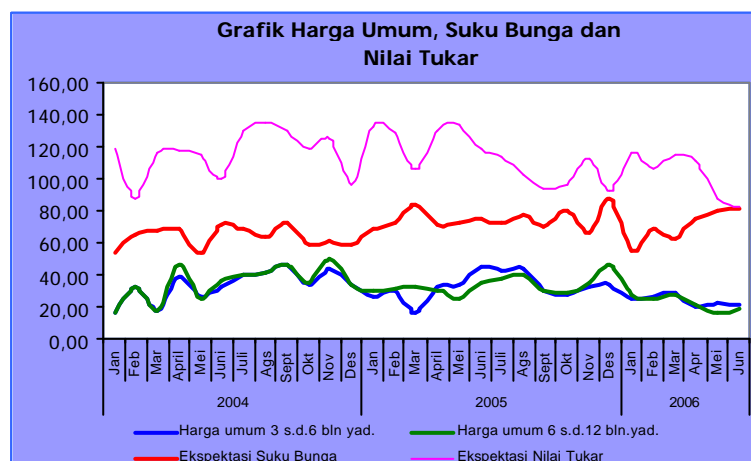


Sumber : survey, diolah

Ekspektasi Harga Umum, Suku Bunga dan Nilai Tukar

Indeks ekspektasi konsumen terhadap harga baik dalam jangka pendek (3 s.d. 6 bulan mendatang) maupun dalam jangka menengah (6 s.d 12 bulan mendatang) pada triwulan laporan masih berada pada level yang sangat pesimis dan menunjukkan penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Angka indeks yang mengukur ekspektasi harga dalam jangka pendek pada akhir triwulan (Juni 2006) tercatat sebesar 20,50 dan rata-rata pada triwulan laporan sebesar 21,00. Sedangkan indeks ekspektasi harga dalam jangka menengah pada akhir triwulan tercatat sebesar 19,00 dan rata-rata pada akhir triwulan tercatat sebesar 18,15.

Hasil survei pada triwulan laporan menunjukkan bahwa mayoritas responden (85,83%) memprediksikan tingkat harga umum akan cenderung naik dalam 6 s.d. 12 bulan mendatang. Responden yang berpendapat bahwa akan terjadi kenaikan harga umum tersebut disebabkan oleh ketersediaan barang dan jasa yang terbatas (23,57%), berkurangnya subsidi pemerintah (20,12%), situasi keamanan/sosial politik yang kurang stabil (18,57%) dan distribusi barang yang terganggu (15,12%)



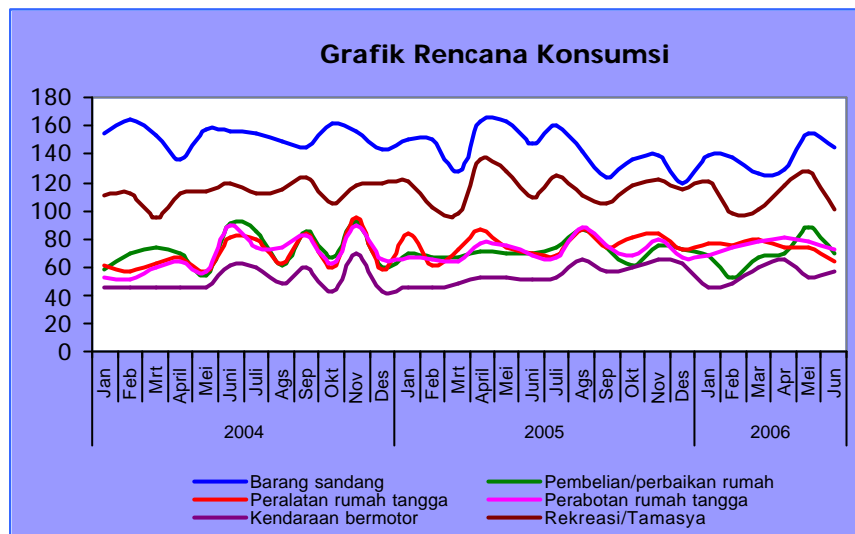
Ekspektasi konsumen terhadap suku bunga masih berada pada level pesimis dengan pergerakan yang membaik. Angka indeks ekspektasi

terhadap suku bunga pada akhir triwulan sebesar 81,00 dan rata-rata pada triwulan laporan naik 16,67 poin dibanding triwulan sebelumnya menjadi sebesar 78,67. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap nilai tukar kembali berada pada level pesimis dengan angka indeks pada akhir triwulan tercatat sebesar 81,50 dengan indeks rata-rata pada triwulan laporan sebesar 93,17 turun 19,17 poin dibanding triwulan sebelumnya.

Rencana Konsumsi

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa konsumen cenderung pesimis untuk melakukan pembelian/konsumsi (durable & non durable goods) dengan angka indeks rata-rata dalam triwulan laporan sebesar 72,50 naik 2,67 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dari 6 kategori kelompok barang yang ditanyakan dalam survei, konsumen hanya optimis untuk melakukan pembelian barang sandang serta melakukan rekreasi, sedangkan untuk konsumsi pada kelompok barang yang lain seperti perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga, pembelian/perbaikan rumah, dan pembelian kendaraan bermotor masih berada pada tingkat pesimis.

Beberapa alasan utama yang dikemukakan responden yang tidak akan membeli barang tahan lama adalah harga barang saat ini relatif mahal (40,74%), tidak mampu membeli karena kondisi keuangan terbatas (33,46%), suku bunga simpanan yang cenderung akan meningkat (8,99%), tingginya ketidakpastian masa yang akan datang (8,20%) dan suku bunga simpanan yang saat ini relatif tinggi (7,41%).

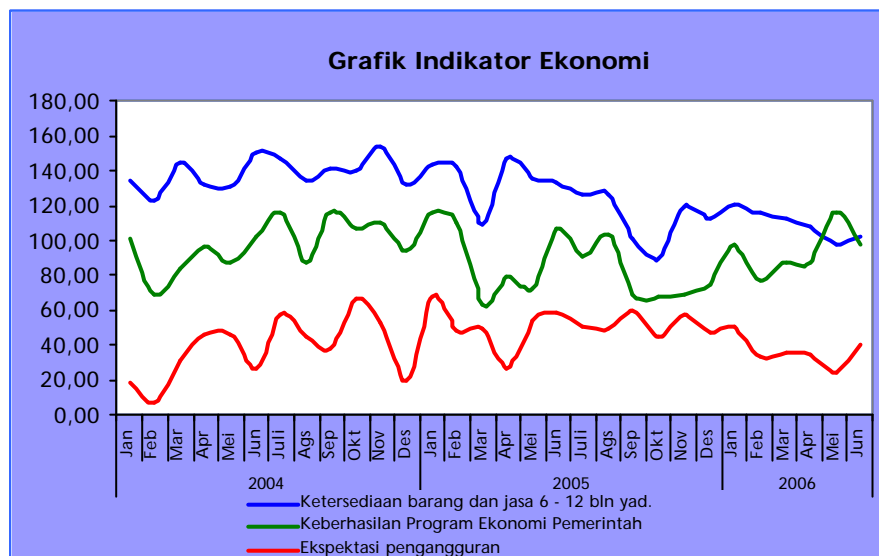


Keyakinan Terhadap Indikator Ekonomi Lainnya

Hasil survei memperlihatkan bahwa keyakinan konsumen terhadap keberhasilan program ekonomi pemerintah yang akan dijalankan pada 6 s.d. 12 bulan mendatang masih berada pada kondisi yang optimis walaupun pada triwulan laporan menunjukkan penurunan. Angka indeks rata-rata pada triwulan laporan tercatat sebesar 100,17 turun dibanding triwulan sebelumnya, sedangkan indeks pada akhir triwulan laporan turun tercatat sebesar 97,50.

Pendapat responden terhadap ketersediaan barang dan jasa dalam 6 s.d. 12 bulan yang akan datang walaupun masih berada pada kondisi yang optimis namun indeks rata-rata pada triwulan laporan menunjukkan penurunan dengan angka sebesar 102,33 turun 13,83 poin dibanding triwulan sebelumnya sedangkan indeks pada akhir triwulan laporan meningkat 5,50 poin dibanding bulan sebelumnya menjadi sebesar 102,50.

Hal yang berbeda terjadi dengan ekspektasi responden terhadap jumlah pengangguran dalam 6 s.d. 12 bulan yang akan datang, pada akhir triwulan angka indeks menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya namun secara rata-rata dalam triwulan laporan menunjukkan penurunan. Pada akhir triwulan angka indeks sebesar 40,00 naik 16,00 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya sedangkan angka indeks rata-rata dalam triwulan laporan sebesar 33,00 turun 7,17 poin dibanding triwulan sebelumnya.



Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah juga menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi asset, dana pihak ketiga maupun kredit yang disalurkan.

3.1. Perkembangan Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, jumlah bank di Kalimantan Tengah pada triwulan II-2006 adalah sebanyak 9 bank yang terdiri dari 7 bank umum konvensional, 1 bank umum syariah dan 1 Bank Perkreditan Rakyat. Adapun jumlah jaringan kantor bank umum di Kalimantan Tengah sebanyak 87 kantor (termasuk kantor BRI unit) sedangkan BPR hanya terdapat 1 kantor.

**Tabel 3.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan
Di Propinsi Kalimantan Tengah**

Jenis Bank	TwII-05	TwIII-05	TwIV-05	TwI-06	TwII-06
1. Bank Umum					
- Jumlah Bank	8	8	8	8	8
- Jumlah Kantor*)	82	83	85	85	86
2. Bank Perkreditan Rakyat					
- Jumlah Bank	1	1	1	1	1
- Jumlah Kantor	1	1	1	1	1

*) termasuk Kantor BRI unit

3.2. Perkembangan Aset

Asset perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah posisi triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp6.126,18 milyar, tumbuh 32,08% (Y-o-Y) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada dua sisi, pertama dari sisi pasiva yang disebabkan adanya peningkatan penghimpunan dana masyarakat, dan yang kedua dari sisi aktiva antara lain disebabkan oleh meningkatnya kredit yang disalurkan. Berdasarkan lokasi bank, aset bank umum terbesar

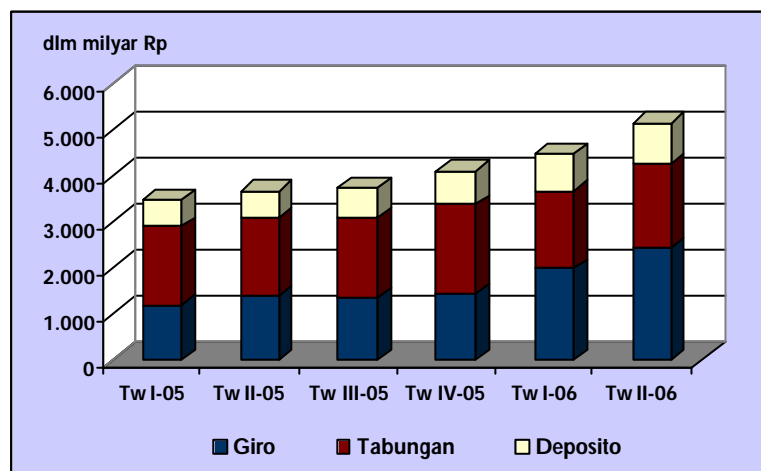
berada di wilayah kota Palangka Raya dengan aset sebesar Rp2.397,17 milyar disusul aset bank umum di Kotawaringin Timur sebesar Rp1.506,74 milyar.

3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah posisi akhir triwulan II-2006 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 40,51%(Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp5.160,66 milyar. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh DPK dalam bentuk giro yaitu sebesar 74,19% (Y-o-Y), diikuti oleh deposito 53,80% dan tabungan 8,07%. Pertumbuhan giro yang tinggi tersebut menyebabkan proporsi giro yang sebelumnya berada di posisi kedua setelah tabungan meningkat ke posisi pertama dengan proporsi sebesar 47,17% disusul tabungan 35,42% dan deposito 17,41%.

Grafik 3.1

Proporsi Dana Pihak Ketiga Perbankan



Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Tengah, DPK terbesar berhasil dihimpun perbankan di Kota Palangka Raya dengan nilai sebesar Rp1.964,69 milyar (39,59%) diikuti Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.214,48 milyar (24,47%) dan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp855,25 milyar (17,23%). Sementara itu, pertumbuhan penghimpunan DPK tertinggi dalam triwulan laporan dicatat oleh perbankan kabupaten lainnya (gabungan Barito Utara dan Barito Selatan) sebesar 68,53% diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat 50,10% dan Kota Palangka Raya 39,24%.

**Tabel 3.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Per Kabupaten/Kota**

Kab/Kota	Dlm Rp Juta				
	Tw II 05	Tw III 05	Tw IV 05	Tw I 06	Tw II 06
Palangka Raya	1.409.988	1.467.589	1.655.594	1.730.357	1.964.688
Kotawaringin Timur	960.606	1.017.346	1.116.197	1.125.976	1.214.478
Kotawaringin Barat	569.782	538.426	582.882	675.802	855.249
Kapuas	323.697	317.256	301.949	366.126	437.267
Kabupaten lainnya	408.810	398.506	452.701	574.109	688.975
Total	3.672.883	3.739.123	4.109.323	4.472.370	5.160.657

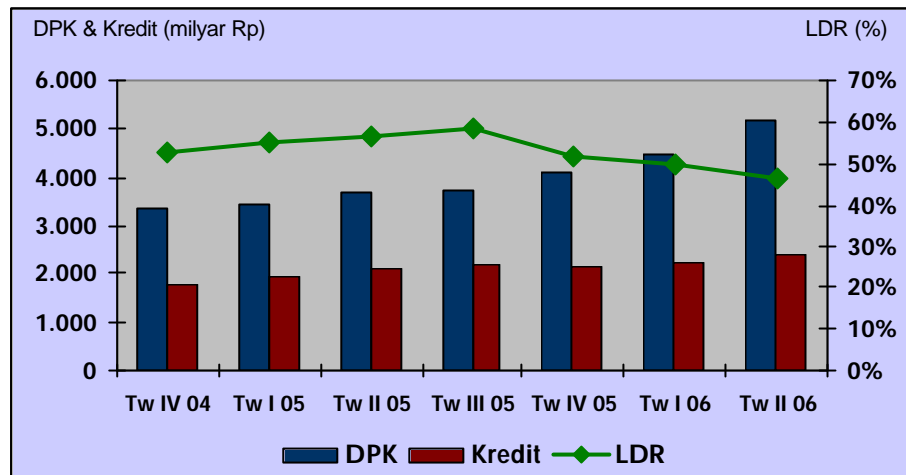
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum

3.4. Perkembangan Kredit dan LDR

Berdasarkan Lokasi Bank

Perkembangan penyaluran kredit perbankan di Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan laporan tercatat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan walaupun lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Secara tahunan, kredit yang disalurkan perbankan Kalimantan Tengah tercatat sebesar 15,56% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp2.391,05 milyar. Dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar 40,51%, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan rasio antara kredit yang disalurkan dengan dana masyarakat yang berhasil dihimpun (*Loans to deposit ratio* ; LDR) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *Loans to deposit ratio* pada triwulan laporan tercatat sebesar 46,33% sedangkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar 56,33%.

Grafik 3.2
Pertumbuhan DPK, Kredit dan LDR



Ditinjau dari lokasi bank di tiap dati II, penyalur kredit terbesar dicatat oleh perbankan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebesar Rp815,04 milyar atau 34,09% dari total kredit yang disalurkan perbankan Kalimantan Tengah, disusul oleh perbankan di Kota Palangka Raya 20,43% dan Kabupaten Kotawaringin Barat 26,66%.

Tabel 3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan
Per Kabupaten/Kota

Wilayah	Dim Rp Juta				
	Tw II 2005	Tw III 2005	Tw IV 2005	Tw I 2006	Tw II 2006
Kotawaringin Timur	604.957	651.091	704.108	747.751	815.039
Kotawaringin Barat	560.161	579.114	490.632	497.069	488.438
Palangka Raya	521.664	539.698	551.992	575.323	637.413
Kuala Kapuas	186.398	189.989	193.122	200.344	225.519
Kabupaten lainnya	205.121	220.883	190.484	199.661	224.639
Total	2.078.301	2.180.775	2.130.338	2.220.148	2.391.048

Sumber : Laporan LBU

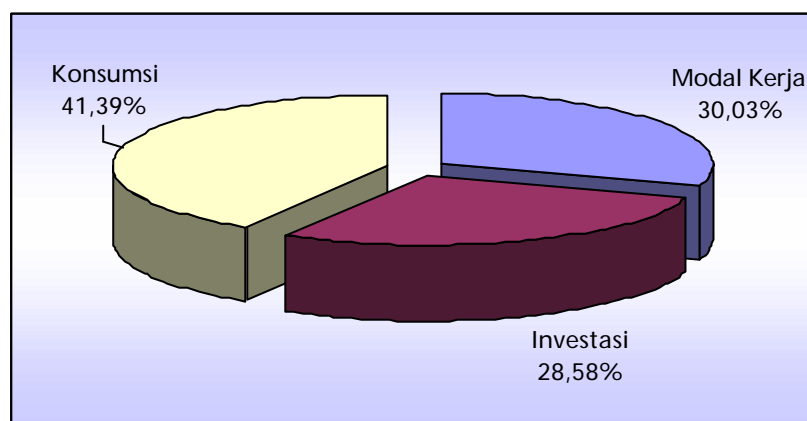
Berdasarkan data DPK dan kredit yang disalurkan di tiap-tiap kota/kabupaten di atas, dapat diketahui bahwa *Loans to deposit ratio* (LDR) perbankan di Kotawaringin Timur tercatat paling tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yaitu sebesar 67,11% disusul oleh perbankan di Kabupaten Kotawaringin Barat 57,11% dan Kabupaten

Kuala Kapuas 51,57% sementara perbankan di Kota Palangka Raya tercatat mempunyai LDR terkecil yaitu sebesar 32,44%.

Dilihat dari jenis penggunaannya, penyaluran kredit perbankan di Kalimantan Tengah didominasi kredit yang bersifat konsumtif yaitu mencapai 41,39% dengan nilai sebesar Rp989,74 milyar disusul oleh investasi sebesar Rp718,02 milyar dan modal kerja Rp683,28 milyar. Hal ini sejalan dengan kondisi usaha dan perekonomian yang belum cukup stabil sehingga perbankan masih sangat hati-hati dalam memberikan kredit kepada usaha-usaha produktif dan cenderung lebih memilih untuk menyalurkan kredit konsumsi terutama kepada pegawai yang dinilai relatif aman.

Grafik 3.3

Proporsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, kredit sektor lainnya yang didalamnya sebagian besar merupakan kredit konsumsi tercatat mendominasi kredit yang disalurkan perbankan Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp994,09 milyar atau 41,58% dari total kredit yang disalurkan. Sementara itu, sejalan dengan dominasi sektor pertanian dalam perekonomian, kredit kepada sektor pertanian tercatat berada pada peringkat kedua terbesar yaitu sebesar Rp623,16 milyar (26,06%) disusul oleh kredit kepada sektor perdagangan yaitu sebesar Rp427,94 milyar (17,90%).

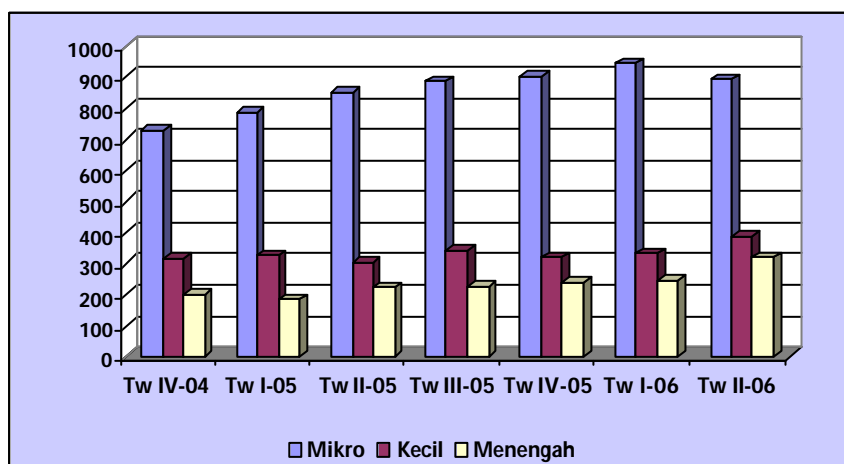
Tabel 3.4 Perkembangan Kredit Sektoral (dlm juta Rp)

Sektor Ekonomi	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Pertumbuhan Y-o-Y
Pertanian	455.283	487.148	463.127	582.019	623.156	36,87%
Pertambangan	800	800	200	-	950	18,75%
Perindustrian	253.872	262.531	247.389	172.454	129.281	-49,08%
Listrik, Gas dan Air	0	77	31	25	144	-
Konstruksi	88.713	110.321	49.908	59.372	128.582	44,94%
Perdagangan, Restoran dan Hotel	337.564	350.507	386.203	397.048	427.940	26,77%
Pengangkutan, Pergudangan	67.203	63.619	57.357	54.740	51.843	-22,86%
Jasa-jasa Dunia Usaha	31.687	36125	30.010	28.618	32.853	79,61%
Jasa-jasa Sosial Masyarakat	4.194	5.228	4.337	3.204	2.211	-47,28%
Lain-lain	843.159	869.647	891.776	922.668	994.088	17,91%
Total	2.078.281	2.180.775	2.130.338	2.220.148	2.391.048	15,56%

Sementara itu, berdasarkan plafond kredit, kredit kepada golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp1.596,29 milyar atau 66,76% dari total kredit yang disalurkan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 15,84%.

Grafik 3.4

Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah



Proporsi terbesar dalam kredit kepada UMKM adalah kredit dengan plafond di bawah Rp50 juta (mikro) yaitu sebesar 55,91% disusul oleh kredit dengan plafond kredit Rp50 juta s.d. Rp500 juta (kecil) sebesar

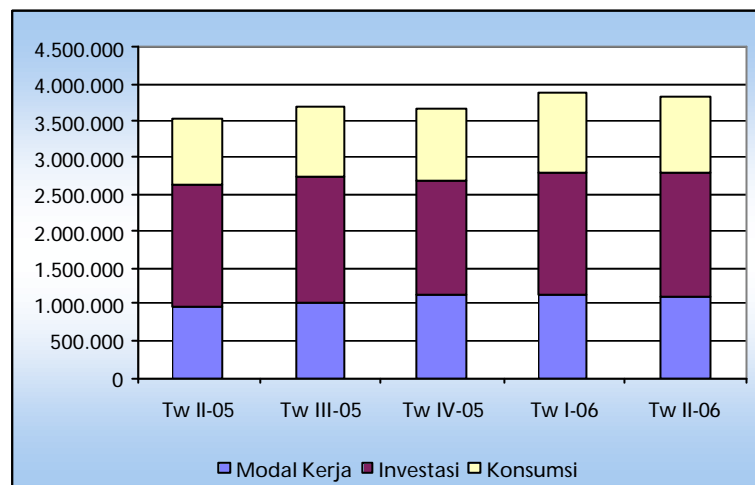
24,07% dan kredit dengan plafond di atas Rp500juta s.d. Rp5 milyar sebesar 20,01%.

Berdasarkan Lokasi Proyek

Berdasarkan lokasi proyek, kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada usaha-usaha yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II-2006 (posisi bulan Mei 2006) mencapai sebesar Rp3.810,38milyar atau meningkat 9,48% (y-o-y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ditinjau dari jenis penggunaannya, kredit investasi tercatat mempunyai proporsi yang paling besar dalam penyaluran kredit lokasi proyek yaitu 41,82% dengan nilai Rp1.580,92 milyar disusul kredit modal kerja 30,50% dan kredit konsumsi 27,68%.

Grafik 3.5

Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan Menurut Lokasi Proyek (dIm Juta Rp)



Dengan DPK yang tercatat sebesar Rp4.877,67milyar pada bulan Mei 2006, LDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 78,12%. Jika dibandingkan dengan LDR berdasarkan lokasi bank yang sebesar 46,33%, dapat disimpulkan bahwa sebagian kredit yang disalurkan untuk kegiatan ekonomi di Propinsi Kalimantan tengah berasal dari perbankan di luar Kalimantan Tengah.

**Tabel 3.5 Perkembangan Kredit Sektoral berdasarkan Lokasi Proyek Posisi
Bulan Mei 2006 (juta Rp)**

Sektor Ekonomi	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06
Pertanian	1.564.737	1.604.461	1.586.114	1.748.257	1.682.888
Pertambangan	12379	16.954	10.022	9.822	7.139
Perindustrian	428.901	460.816	459.609	418.738	405.220
Listrik, Gas dan Air	45837	47.008	48.337	49.570	49.689
Konstruksi	90.966	112.939	50.450	61.022	104.303
Perdagangan, Restoran dan Hotel	342.278	358.847	393.081	406.755	396.391
Pengangkutan, Pergudangan	75.505	70.881	63.538	59.797	58.051
Jasa-jasa Dunia Usaha	35.823	40.374	37.877	44.650	48.987
Jasa-jasa Sosial Masyarakat	5.613	6.902	4.980	4.816	3.967
Lain-lain	933.720	974.184	1.018.083	1.093.482	1.053.673
Total	3.535.759	3.693.366	3.672.091	3.896.909	3.810.308

Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertanian di Propinsi Kalimantan Tengah menyerap kredit perbankan sebesar Rp1.682,89milyar pada triwulan laporan atau sebesar 44,17% dari total kredit berdasarkan lokasi proyek disusul oleh sektor lainnya (27,65%) dan sektor industri (10,63%). Dalam periode laporan, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif (Y-o-Y) yaitu sektor pertambangan, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan pergudangan dan sektor jasa sosial masyarakat.

3.5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Nilai transaksi keuangan baik secara tunai maupun non tunai pada triwulan II-2006 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu (y-o-y). Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai "cash center" untuk mengelola peredaran uang antar bank di daerah dan ketentuan untuk hanya menerima uang yang tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia, terjadi penurunan yang sangat signifikan atas inflow uang tunai dari perbankan ke Bank Indonesia khususnya pada dua bulan terakhir. Disatu sisi, rasio pengenaan tanda tidak berharga (PTTB) atas uang yang tidak layak edar semakin besar.

Tabel 3.6 Perkembangan Inflow Outflow

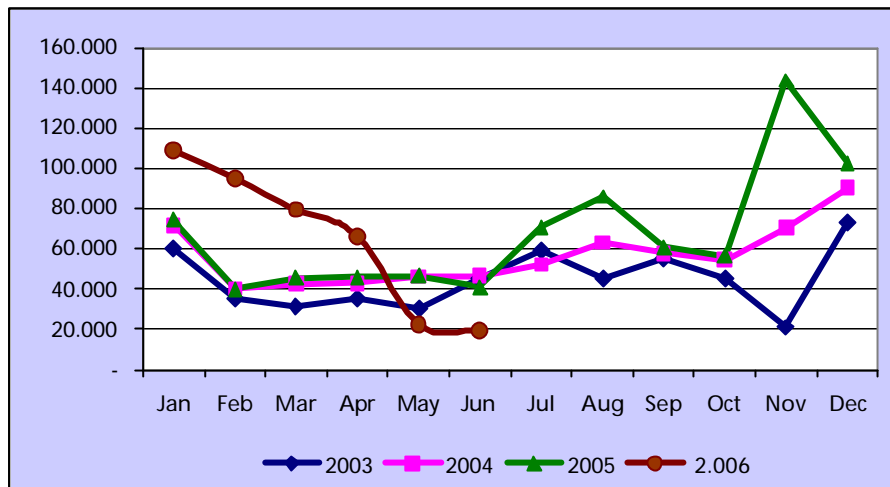
Periode	Inflow		Outflow	
	(Milyar Rp)	YoY (%)	(Milyar Rp)	YoY (%)
Triwulan I-2003	126,58	-9,33	362,60	14,00
Triwulan II-2003	111,60	18,20	485,99	30,79
Triwulan III-2003	159,60	48,52	472,68	18,12
Triwulan IV-2003	139,83	18,67	636,46	34,03
Triwulan I-2004	155,06	22,50	394,40	8,77
Triwulan II-2004	135,90	21,77	627,37	29,10
Triwulan III-2004	173,34	8,56	641,59	35,73
Triwulan IV-2004	215,72	54,26	683,42	7,37
Triwulan I-2005	160,59	3,57	413,05	4,73
Triwulan II-2005	133,95	-1,44	539,01	14,08
Triwulan III-2005	218,06	25,8	693,60	8,11
Triwulan IV-2005	303,46	40,67	981,47	43,61
Triwulan I-2006	284,23	77,00	436,87	5,77
Triwulan II-2006	108,51	-18,99	701,54	30,15

a. Transaksi Keuangan Secara Tunai

Transaksi setoran uang masuk (*inflow*) Bank Indonesia pada triwulan laporan menunjukkan penurunan sebesar 18,99% (Y-o-Y) jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2005 dengan nilai sebesar Rp108,51milyar. Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) mengalami kenaikan sebesar 30,15% (Y-o-Y) dengan nilai sebesar Rp701,54milyar. Kondisi aliran uang kartal keluar yang lebih besar dibanding aliran uang kartal masuk tersebut mengakibatkan terjadi *net outflow* sebesar Rp593,04milyar.

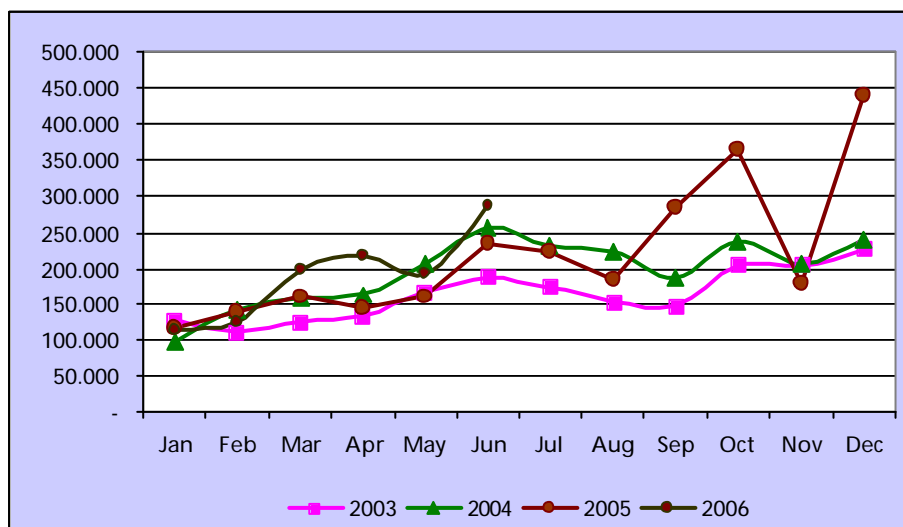
Jika ditinjau fluktuasi secara bulanan, terlihat bahwa pergerakan aliran uang masuk (*inflow*) pada dua bulan terakhir tercatat sangat rendah sebagai akibat dari ketentuan Bank Indonesia yang membatasi hanya uang yang tidak layak edar yang dapat disetorkan perbankan kepada Bank Indonesia.

Grafik 3.7
Perkembangan Inflow



Meskipun terjadi penurunan inflow yang sangat signifikan, aliran uang kartal keluar (*outflow*) dari perbankan dalam triwulan laporan tetap menunjukkan pergerakan yang stabil dan mempunyai kesamaan pola dengan periode-periode sebelumnya. Secara triwulanan, aliran uang kartal keluar tercatat mengalami peningkatan sebesar 30,15% dibandingkan dengan periode triwulan II-2006.

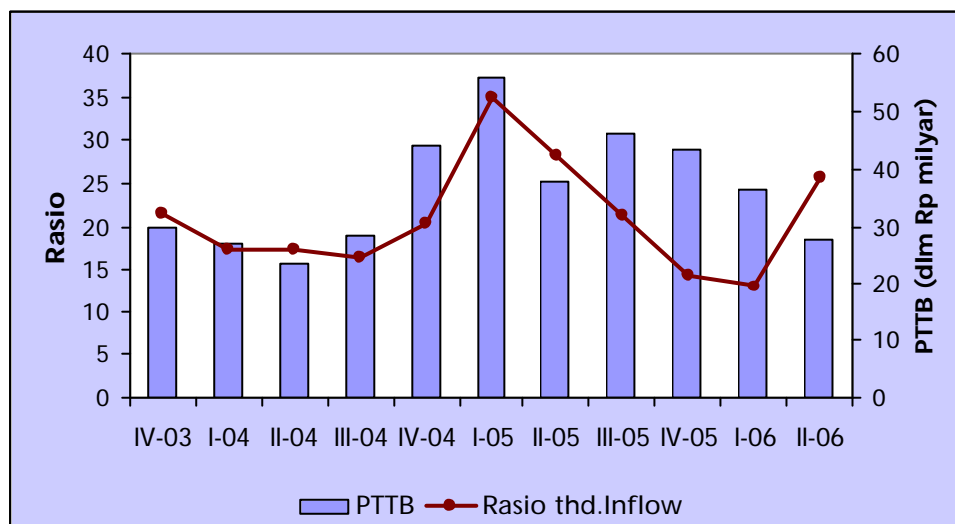
Grafik 3.8
Perkembangan Outflow



b. Penyediaan Uang Layak Edar

Sebagai upaya memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan, maka terhadap uang yang sudah tidak layak edar dilakukan kegiatan pemusnahan atau pemberian tanda tidak berharga (PTTB). Kebijakan untuk memelihara kualitas uang yang beredar di masyarakat tersebut lazim dikenal dengan istilah "*Clean Money Policy*", yang merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia. Uang yang sudah diberi tanda tidak berharga selanjutnya dimusnahkan dan diganti uang yang baru. Dalam hal ini penambahan uang baru tidak menambah jumlah uang beredar di masyarakat, karena sifatnya hanya menggantikan uang-uang yang lusuh dan tidak layak edar.

Grafik 3.9
PTTB & Rasio PTTB terhadap Inflow



Pada triwulan II-2006 jumlah PTTB uang kartal yang tidak layak edar di Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 26,13% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Rasio PPTB terhadap jumlah uang kartal yang masuk (*inflow*) mencapai 25,64%. Hal ini berarti bahwa 25,64% dari seluruh uang yang disetorkan kembali ke Bank Indonesia dinyatakan tidak layak diedarkan kembali atau harus dimusnahkan.

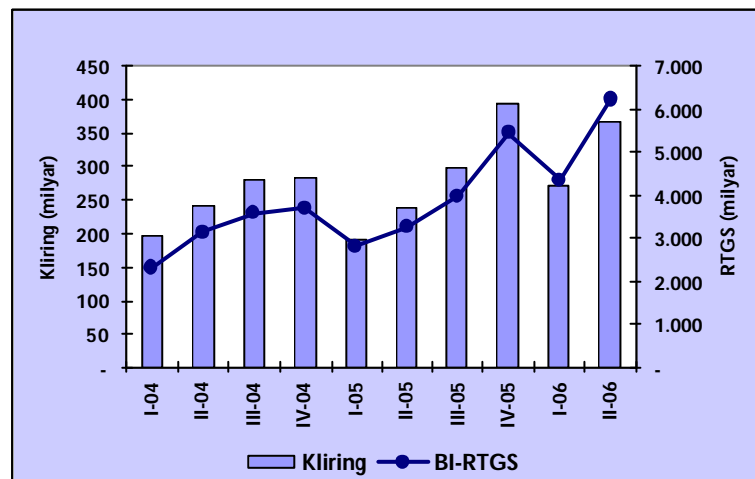
Dari grafik terlihat bahwa sejak awal tahun rasio PTTB terhadap terhadap aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) menunjukkan

kecenderungan meningkat pada triwulan II-2006 sementara dari sisi nominal uang mengalami kecenderungan menurun sejak triwulan IV-2005.

c. Transaksi Non Tunai

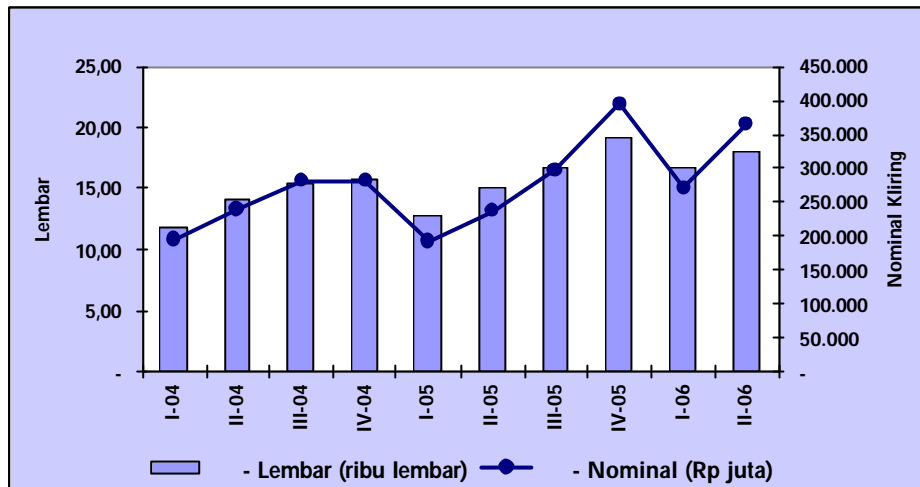
Transaksi non tunai perbankan Kalimantan Tengah yang meliputi kliring dan RTGS pada triwulan II-2006 meningkat Rp3.087,99milyar atau 88,45% (Y-o-Y) yaitu dari Rp3.489,91milyar pada triwulan II-2005 menjadi Rp6.576,90milyar. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini mengindikasikan aktivitas perekonomian yang meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik pergerakan volume transaksi kliring maupun RTGS menunjukkan kemiripan pola pergerakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan volume transaksi yang menunjukkan kecenderungan meningkat.

Grafik 3.10
Perkembangan Transaksi Non Tunai Melalui
Kliring dan RTGS



Transaksi kliring pada triwulan II-2006 tercatat sebanyak 18.042 lembar warkat dengan nilai transaksi sebesar Rp366,85 milyar. Dari pola pergerakan transaksi kliring ini, diketahui bahwa perkembangan transaksi kliring erat berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah dimana pada awal tahun relatif lebih kecil dibandingkan dengan triwulan-triwulan berikutnya.

Grafik 3.11
Perkembangan Transaksi Melalui Kliring



Dibandingkan dengan transaksi kliring, transaksi RTGS yang dirancang untuk transaksi dengan volume besar menunjukkan nilai transaksi yang jauh lebih besar.

Tabel 3.7 Perkembangan RTGS

Periode	RTGS Keluar (Rp milyar)	RTGS Masuk (Rp milyar)
Triwulan I-2004	1.165,24	1.140,76
Triwulan II-2004	1.489,09	1.627,83
Triwulan III-2004	1.676,18	1.919,03
Triwulan IV-2004	1.769,77	1.944,45
Triwulan I-2005	1.309,90	1.482,76
Triwulan II-2005	1.522,85	1.729,92
Triwulan III-2005	2.095,75	1.884,56
Triwulan IV-2005	2.705,86	2.766,99
Triwulan I-2006	2.150,34	2.207,83
Triwulan II-2006	3.032,54	3.177,50

Pada triwulan II-2006 tercatat pengiriman uang keluar Kalimantan Tengah melalui RTGS sebesar Rp3.032,54milyar sedangkan RTGS yang masuk ke Kalimantan Tengah sebesar Rp3.177,50milyar. Dengan demikian secara *netto* terdapat aliran dana non tunai masuk ke Kalimantan Tengah sebesar Rp144,96 milyar.

BOKS

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KERJASAMA PEMDA, LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAN PERBANKAN SUATU SOLUSI BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, UMKM telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Sejalan dengan itu, perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap sektor UMKM pun dari waktu ke waktu semakin besar.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM khususnya yang tergolong dalam UKM adalah terbatasnya kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yang antara lain adalah dengan melakukan pembinaan melalui Dinas Teknis, membentuk tim pendamping UMKM atau BDS, melembagakan KKMB, meminta komitmen bank dalam pembiayaan UMKM dalam Bussiness Plan-nya dan juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBD atau bagian laba BUMN/D yang disisihkan.

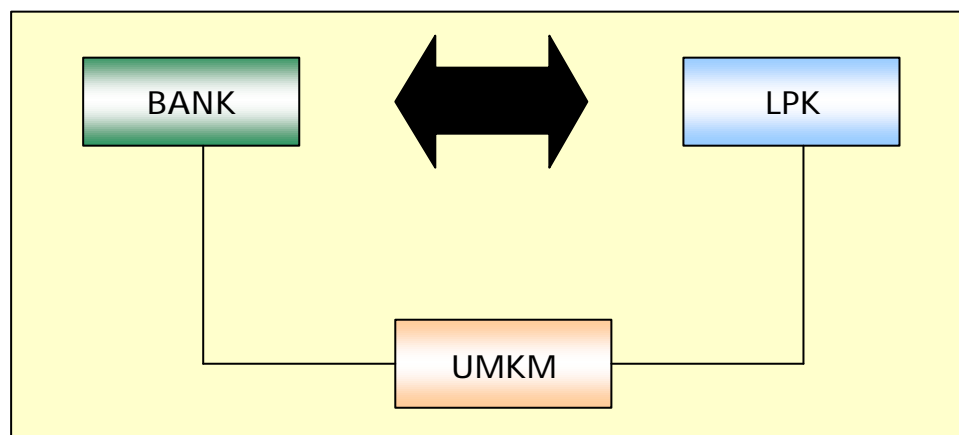
Berkaitan dengan masalah permodalan, upaya pemerintah dengan menyediakan dana bergulir baru menjangkau sebagian kecil usaha yang ada. Sementara itu, banyak UKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal walaupun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*) akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank (*tidak bankable*). Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UKM sehingga UKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

2. LEMBAGA PENJAMIN KREDIT (LPK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.017/96 tanggal 30 Juli 1996 tentang perusahaan penjaminan, di Indonesia telah berdiri beberapa perusahaan penjaminan yang antara

lain adalah PT. ASKRINDO, Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. PKPI. Khusus mengenai Lembaga Penjamin Kredit Daerah, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Urusan Koperasi & UKM dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No.04/KEP/M/V/2001 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan UKM di daerah.

Upaya meningkatkan akses kredit UKM ke perbankan melalui penjaminan kredit juga menjadi perhatian Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam salah satu dari 19 rekomendasi kebijakan perbankan yang harus ditempuh dalam kerangka cetak biru mengenai tatanan industri perbankan ke depan atau yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor riil adalah dengan memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit.



Model kerjasama antara Bank dengan LPK secara umum telah dilakukan antara perusahaan asuransi kredit baik untuk kredit yang bersifat individual maupun portofolio dengan perbankan. Dengan model penjaminan ini, maka terjadi pengalihan/pembagian resiko kredit (*default risk*) antara Bank dengan LPK. Dengan model ini, seharusnya Bank tidak menambahkan premium risk dalam perhitungan tingkat suku bunga yang diberikan kepada UMKM.

3. PRAKTEK PENJAMINAN KREDIT DI BEBERAPA NEGARA TETANGGA.

Kegiatan penjaminan kredit telah secara luas dilakukan oleh berbagai negara. Di kawasan ASEAN sendiri, negara seperti Malaysia telah melakukan praktek penjaminan kredit sejak tahun 1972. Beberapa praktek penjaminan yang dilakukan oleh negara tetangga antara lain adalah sebagai berikut :

1. Thailand.

Small Industry Credit Guarantee Corporation (SICGC) adalah LPK di Thailand yang beroperasi sejak 21 Februari 1992, dengan tujuan utama memberikan jaminan kredit kepada kredit yang mengalami kekurangan *collateral*. Lembaga ini merupakan lembaga non profit dengan mayoritas kepemilikan oleh pemerintah (93,18%) disamping asosiasi bank swasta, bank milik pemerintah dll.

2. Filipina.

The Small Business Guarantee and Finance Corporation (SB Corporation) didirikan tahun 1991 namun beroperasi sebagai lembaga penjaminan kredit untuk usaha kecil sejak tahun 2001 dengan kepemilikan terdiri dari 43% oleh pemerintah pusat dan 57% oleh 5 lembaga keuangan milik pemerintah.

3. Malaysia

The Credit Guarantee Corporation Bhd (CGC) didirikan pada tahun 1972 dengan kepemilikan terdiri dari Bank Negara Malaysia dan Commercial Bank & Financial Companies.

4. OPTIMALISASI PERAN PEMDA DALAM PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENJAMINAN KREDIT

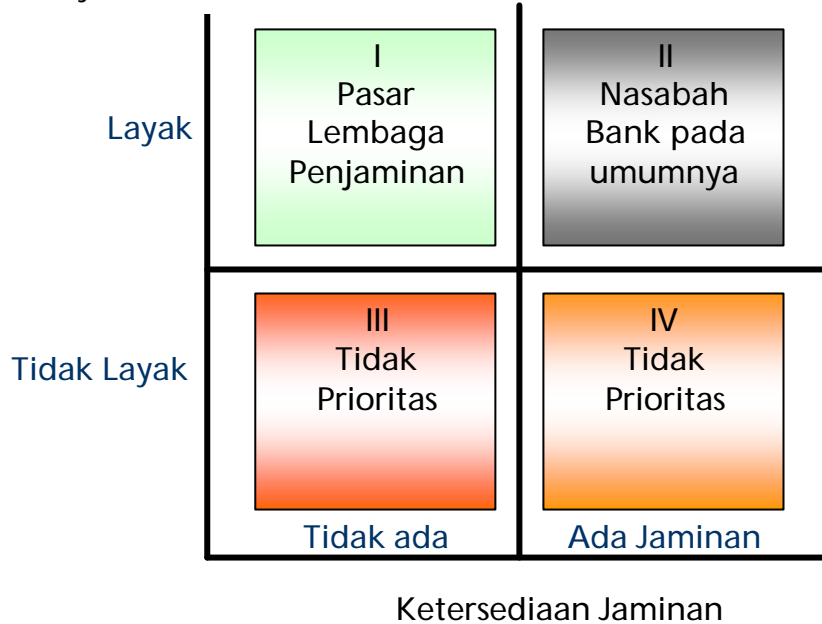
Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan daerah tingkat II di wilayah Kalimantan Tengah dalam memberdayakan UMKM. Berkaitan dengan peningkatan akses UMKM kepada Perbankan, PEMDA telah mengupayakan peningkatan kualitas pendamping UMKM dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pendamping UMKM baik yang berstatus

sebagai pegawai negeri sipil maupun pendamping UKM yang merupakan lembaga swasta (BDS). Akan tetapi, jasa pendampingan yang dilakukan hanya dapat menghasilkan output yang optimal apabila sektor UMKM yang didampingi adalah UMKM yang mempunyai kriteria *feasible* dan mempunyai potensi bankable. Terhadap UMKM yang mempunyai kriteria dimaksud, pendamping UMKM dapat melakukan perbaikan pengelolaan usaha baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun aspek legal dari usaha yang dijalankan (termasuk didalamnya sertifikasi tanah yang dimiliki yang dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan dan sebagainya).

Akan tetapi, berdasarkan hasil dialog yang dilakukan dan informasi yang disampaikan oleh Dinas Teknis pembina UMKM, banyak UMKM yang pada dasarnya *feasible* namun tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit perbankan (tidak *bankable*), yang salah satunya adalah karena tidak mempunyai jaminan tambahan yang dipersyaratkan perbankan. Menghadapi kondisi tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mengupayakan penjaminan kredit melalui kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) maupun dengan membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Secara lebih jelas, pasar bagi lembaga penjaminan kredit dapat digambarkan pada diagram dibawah. Pada diagram dibawah, kuadran I menunjukkan pasar lembaga penjaminan kredit yaitu UKM atau Koperasi yang memiliki usaha yang layak untuk dibiayai (*feasible*) akan tetapi tidak memiliki agunan yang cukup (kuadran I), sementara kuadran ke II merupakan pasar bagi perbankan pada umumnya yaitu UKM yang usahanya layak untuk dibiayai dan memiliki jaminan tambahan.

Kelayakan Usaha



Dengan asumsi bahwa sebagian besar UKM yang menjadi pasar sasaran merupakan usaha yang belum/tidak berbadan hukum, maka berdasarkan Survei Usaha Terintegrasi Badan Pusat Statistik tahun 2003, potensi pasar Lembaga Penjaminan Kredit di Kalimantan Tengah tampak pada tabel di bawah ini :

Jumlah Usaha yang Tidak Berbadan Hukum di Propinsi Kalimantan Tengah

Jumlah Usaha	Tidak Memanfaatkan Pinjaman	Memanfaatkan pinjaman
132.669	116.768	15.901

Sumber Modal Pinjaman Usaha yang Tidak Berbadan Hukum di Propinsi Kalimantan Tengah

Sumber Modal Pinjaman Utama						
Bank	Koperasi	LK bukan Bank	Modal Ventura	Perorangan	Keluarga/Famili	Lainnya
3.448	432	171	90	3.635	5.574	2.551

Alasan Utama Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Tidak Meminjam dari Bank

Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank					
Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan	Suku Bunga Tinggi	Tidak Berminat	Proposal Ditolak
1.520	1.976	2.556	2.016	3.796	51

Dari tabel di atas, tampak bahwa hanya sebagian kecil dari UKM yang tidak berbadan hukum yang melakukan akses peminjaman dana dari bank yaitu sebanyak 3.448 usaha atau 2,59% dari 132.669 usaha yang ada (diluar sektor pertanian). Selain itu, sebanyak 2.556 usaha yang menggunakan modal pinjaman menyatakan tidak memiliki jaminan sehingga tidak melakukan akses ke perbankan. Gambaran ini menunjukkan bahwa potensi pasar bagi lembaga penjaminan di Propinsi Kalimantan Tengah cukup besar dan apabila diberdayakan secara optimal akan menjadi penggerak ekonomi yang sangat signifikan.

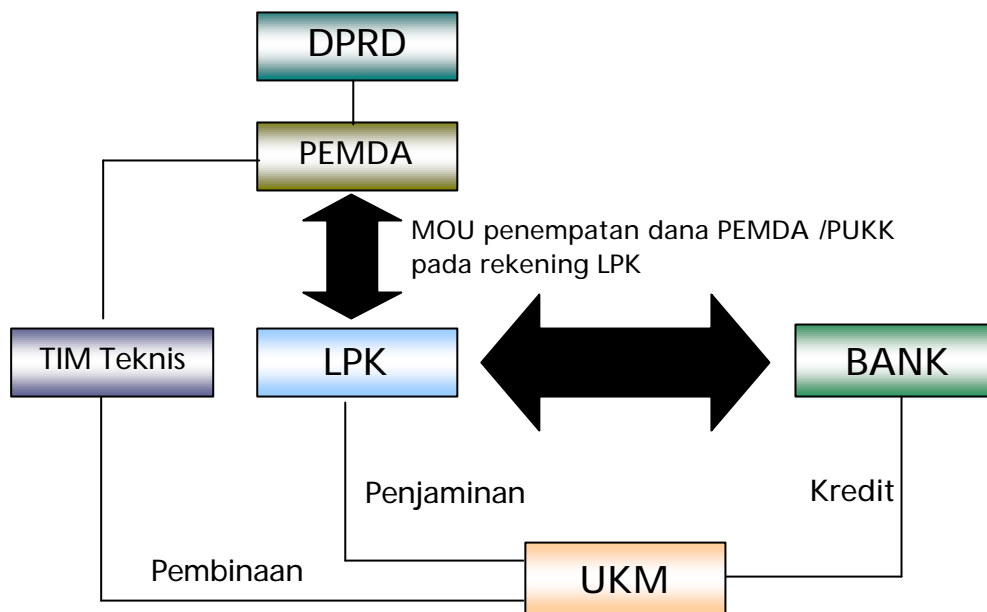
5. SKEMA PENJAMINAN KREDIT DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA).

Beberapa alternatif yang dapat diterapkan dalam melakukan penjaminan kredit UMKM melalui optimalisasi peran PEMDA adalah sebagai berikut :

a. Model Kerjasama PEMDA dengan Lembaga Penjamin Kredit

Model kerjasama LPK dengan PEMDA merupakan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan kredit perbankan dengan melibatkan PEMDA dalam penyediaan dana penjaminan. Sumber dana penjaminan bisa berasal dari APBD yang disisihkan dan diperuntukkan bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dengan skema/model ini, UMKM yang dilibatkan adalah UMKM yang merupakan binaan dari dinas teknis. PEMDA menyediakan dana yang dimasukkan dalam rekening LPK dan oleh LPK dana dimaksud akan digunakan untuk

menjamin kredit yang diajukan kepada Bank oleh UMKM yang telah mendapat persetujuan dari PEMDA.

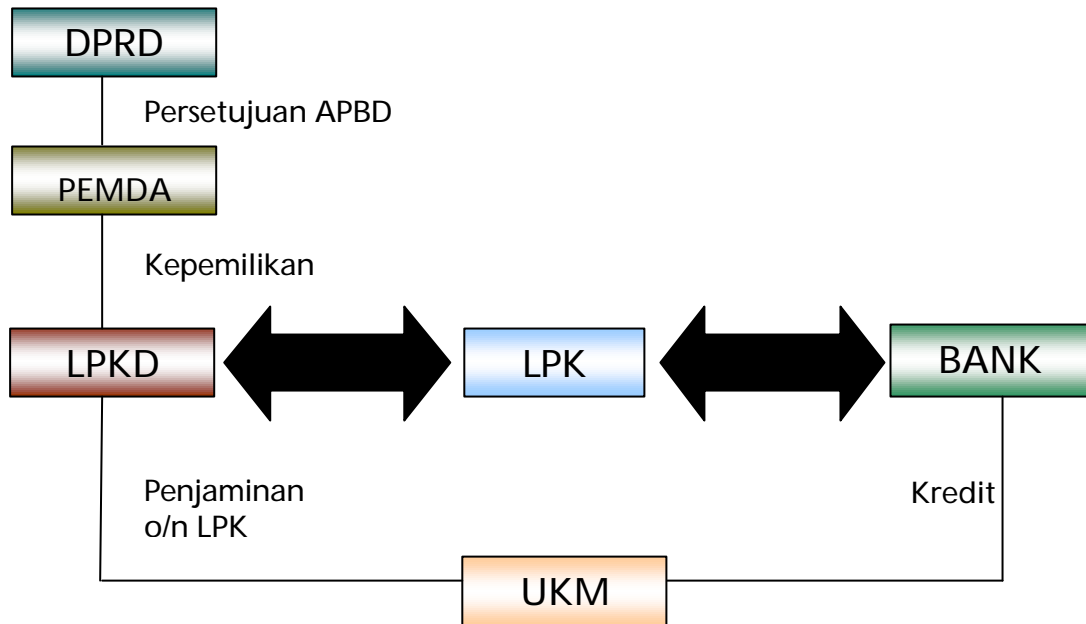


Dengan model ini, maka ada pembagian resiko antara PEMDA, LPK dan Bank sesuai bagian resiko yang telah disepakati bersama. Dana PEMDA yang ditempatkan dalam rekening LPK akan digunakan untuk membiayai *fee* penjaminan, sedangkan bunga dari dana PEMDA yang belum digunakan akan menjadi sumber pendapatan lain bagi LPK dalam membiayai operasionalnya.

b. Model Kerjasama LPK bentukan PEMDA dengan LPK.

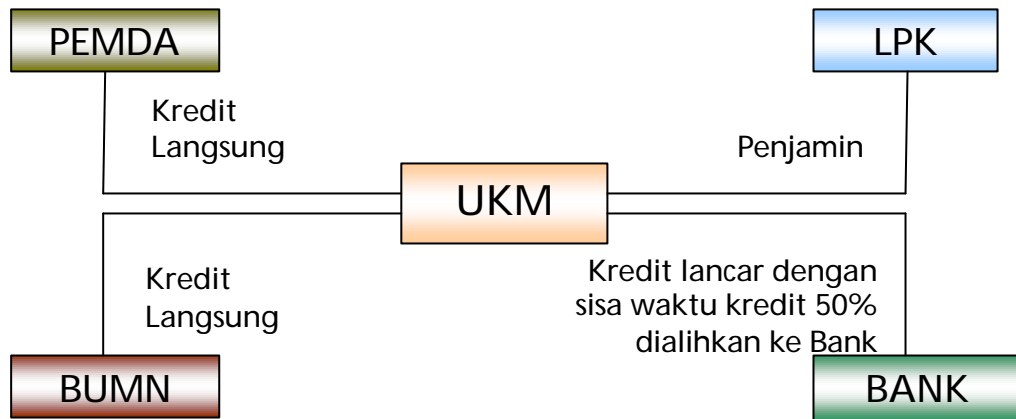
Dalam upaya mengembangkan UMKM di daerah, pembentukan LPKD telah dipraktekkan di beberapa daerah seperti misalnya PEMDA Riau dan PEMDA Sulawesi Selatan. Hingga saat ini setidaknya 16 daerah telah mencoba menerapkan model LPKD sebagai suatu upaya PEMDA dalam memajukan perekonomian daerah. Dalam model ini, PEMDA atas persetujuan DPRD membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dengan dana yang berasal dari APBD. Selanjutnya, LPKD dapat bekerjasama dengan LPK dalam melakukan penjaminan atas kredit UMKM yang diajukan kepada perbankan. Dengan model ini, terjadi pembagian resiko antara PEMDA melalui LPKD, LPK dan Bank. Sejalan dengan waktu, apabila LPKD sudah memiliki pengetahuan dan

pengalaman yang memadai dalam penjaminan kredit, maka LPKD dapat langsung melakukan kerjasama dengan Bank tanpa melalui LPK.



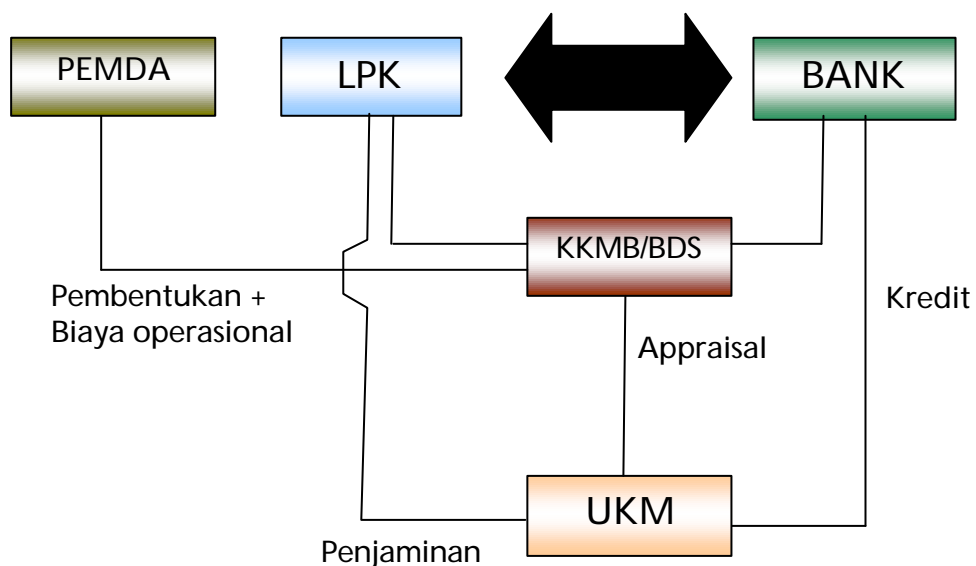
c. Model Pengalihan Kredit Non Bank untuk UMKM binaan PEMDA/BUMN kepada Bank dengan penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit (LPK).

Model ini bertujuan untuk meningkatkan perputaran dana bergulir PEMDA maupun laba BUMN/BUMD yang disisihkan untuk pembinaan UMKM. Usaha mikro kecil yang telah memperoleh kredit yang bersumber dari dana bergulir dan mampu mengembalikan pinjamannya dengan lancar hingga 50% dapat dialihkan ke kredit bank yang sekaligus dijamin oleh LPK. Dengan pengalihan kredit ini maka perputaran dana bergulir yang ada akan semakin cepat sehingga dapat pemberian dana bergulir pada UKM atau koperasi yang lain dapat dipercepat juga. Permasalahan yang sering dihadapi adalah pemahaman yang keliru mengenai pemberian bantuan dana bergulir yang sering diartikan sebagai "pemberian" sehingga UKM/koperasi penerima dana bergulir kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.



d. Model Kerjasama dengan Memanfaatkan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) oleh Lembaga Penjamin Kredit dan Bank.

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Business Development Services (BDS) sesuai dengan tujuan pembentukannya bertujuan untuk menjembatani antara UKM dengan bank. KKMB dan BDS juga berperan sebagai pendamping UKM dalam penyusunan proposal kredit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh bank sehingga secara tidak langsung memudahkan bank dalam menilai kelayakan suatu usaha. Peran ini dapat dimanfaatkan dalam suatu skema kerjasama yaitu KKMB/BDS berperan dalam melakukan *appraisal* atas UKM yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh LPK dan bank.



Berdasarkan data yang ada, jumlah BDS yang aktif yang merupakan binaan dari Dinas koperasi & UKM Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2006 adalah sebanyak 14 BDS yang tersebar di Kota Palangka Raya 4 BDS, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing 2 BDS dan Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Pulang Pisau, Lamandau dan Sukamara masing-masing 1 BDS. Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil yang telah mendapat pelatihan sebagai KKMB di Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 41 orang yang berasal dari berbagai dinas yang antara lain Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian.

6. FEE/BIAYA PENJAMINAN

Biaya penjaminan mencakup biaya administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan di dalam penjaminan misalnya biaya pembayaran kerugian. Beberapa hal yang mempengaruhi besaran fee/biaya penjaminan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peran lembaga penjaminan dalam melakukan analisis kredit. Biaya penjaminan akan lebih tinggi bilamana perusahaan penjaminan harus melakukan seluruh analisis kredit dari lembaga kredit, dari pada sebatas melakukan review untuk menegaskan (*affirming*).
- b. Biaya penjaminan akan berkurang sebagai dampak dan tercapainya efisiensi kolektif. Pada kasus dimana peran kelompok koperasi, LSM dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka bank dan lembaga penjamin kredit dapat melibatkan organisasi-organisasi dimaksud dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan analisa kelayakan usaha dimaksud untuk dibiayai.
- c. Biaya penjaminan juga tergantung dari besarnya skala kredit nilai yang akan dijamin. Semakin besar skala kredit (bagian dari kredit) yang dijamin, maka fee/biaya penjaminan yang akan dikenakan juga semakin besar. Namun demikian, dalam prakteknya penjaminan secara

penuh (*full guarantee*) kurang dapat diterima karena akan menyebabkan *leverage/gearing ratio* menjadi lebih rendah dan tidak adanya pembagian resiko. Umumnya penjaminan dilakukan pada 50% sampai dengan 80% dari kredit yang diberikan sehingga terdapat pembagian resiko antara lembaga penjaminan dan bank pemberi kredit.

- d. Tingkat resiko kredit juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya fee penjaminan. Secara umum, terhadap sektor-sektor usaha yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi, maka komponen biaya penjaminan dari sisi resiko kredit juga akan semakin tinggi. Untuk mengetahui tingkat resiko dimaksud, tingkat *Non Performing Loans* (NPLs) kredit perbankan secara sektoral di suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan.

Tingkat fee penjaminan sangat beragam mulai dari (1-6)% atau tergantung pada persetujuan waktu penjaminan yang biasanya ditetapkan dalam periode per tahun. India mengenakan 3% (untuk penjaminan 50%.), Malaysia dan Israel 1%, SBA Amerika Serikat mengenakan fee sebesar 2% sesuai dengan persetujuan waktu penjaminan sedangkan di Indonesia fee penjaminan berkisar antara 1 sampai dengan 2% per tahun.

7. RESIKO YANG DIHADAPI

Sesuai dengan karakteristik usahanya, maka lembaga penjaminan kredit juga dihadapkan pada resiko usaha yang harus dihadapi. Dengan terlibat dalam penjaminan kredit baik melalui pembentukan LPKD maupun bekerjasama dengan LPK, maka PEMDA akan dihadapkan pada resiko gagal bayar dari UMKM yang dijamin sehingga APBD yang disisihkan sebagai modal penjaminan akan digunakan untuk melunasi bagian kredit yang dijamin tersebut kepada bank sebesar resiko yang menjadi tanggung jawab daerah.

Dengan telah dibayarnya kewajiban UMKM terhadap bank, maka PEMDA melalui LPKD atau LPK mempunyai hak tagih (piutang subrogasi) terhadap kewajiban UMKM dimaksud. Sehingga, untuk dapat menutup

kerugian akibat membayar kewajiban UMKM kepada bank, hak tagih ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Untuk meminimalkan resiko dimaksud, proses seleksi yang baik perlu dilakukan sebelum suatu usaha tersebut dijamin. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam menilai kelayakan usaha untuk dijamin adalah dengan menggunakan pendekatan 5C dengan kriteria minimal 3C (5C minus *collateral* dan *capital*) yaitu karakter, kapasitas dan kondisi harus dapat terpenuhi. Untuk itu, peran dinas teknis sebagai pembina UMKM dan KKMB/BDS yang sudah terbentuk di daerah dapat dioptimalkan dalam melakukan seleksi kelayakan usaha.

8. PILIHAN BAGI DAERAH, MEMBENTUK LPKD ATAU KERJASAMA DENGAN LPK

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar terdapat dua pilihan bagi PEMDA dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui penjaminan kredit yaitu : dengan membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) atau melakukan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) yang sudah berdiri misalnya PT. ASKRINDO, PT. SPU dan PT. PKPI Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh PEMDA berkaitan dalam pilihan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya, perusahaan/lembaga penjaminan kredit daerah adalah lembaga yang berorientasi non profit dengan modal awal pendirian yang berasal dari PBD dan atau APBN. Yang menjadi perhatian, apakah daerah mempunyai kemampuan dalam memenuhi modal minimum yang ditetapkan untuk mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit dimaksud. Apabila suatu daerah memiliki kondisi keuangan yang sangat terbatas dan belum mampu untuk memenuhi modal minimum pendirian LPKD maka daerah dimaksud dapat memilih alternatif bekerjasama dengan LPK yang sudah ada.
- b. Berapa besar potensi UMKM di daerah sangat menentukan bagi keputusan pemilihan pembentukan LPKD atau melakukan kerjasama dengan LPK. Apabila jumlah UMKM yang menjadi potensi pasar bagi

LPKD sangat besar, maka pendirian LPKD akan mempunyai manfaat yang optimal, sebaliknya apabila potensi pasar relatif kecil maka pendirian LPKD akan kurang optimal jika dibandingkan dengan upaya (*effort*) yang dilakukan PEMDA dalam pendirian LPKD.

- c. Tingkat kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi yang cukup merupakan salah satu syarat bagi kelangsungan hidup lembaga penjaminan kredit akan didirikan.
- d. Sejauhmana kehadiran lembaga penjamin kredit daerah dapat dipercaya atau diterima oleh lembaga keuangan. Kepercayaan dunia perbankan sangat penting. Tanpa adanya kepercayaan perbankan, maka keberadaan lembaga penjaminan tidak ada artinya.

9. MANFAAT BAGI DAERAH

Manfaat penjaminan kredit UMKM baik melalui pembentukan LPKD maupun dengan bekerjasama dengan LPK harus dipahami sebagai upaya yang hasilnya tidak secara instan dirasakan/diperoleh daerah dan berpengaruh secara langsung pada penerimaan daerah dalam waktu singkat. Manfaat bagi daerah baru dapat dirasakan ketika UMKM yang mendapatkan tambahan modal dapat berkembang sehingga menggerakkan ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, penting bagi PEMDA untuk tetap melakukan seleksi dan pembinaan bagi UMKM khususnya UKM yang akan mendapat fasilitas penjaminan kredit oleh PEMDA. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa upaya penjaminan kredit akan dapat menghasilkan output yang optimal apabila dilakukan secara sinergi dengan upaya pemberdayaan UMKM lainnya yaitu melalui pendampingan, bimbingan teknis dan sebagainya.

Manfaat yang lain yang sebenarnya merupakan manfaat utama dari penjaminan kredit adalah peningkatan kemampuan pemberian kredit kepada UMKM dengan sumber dana yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, dengan dana sebesar Rp10 milyar yang dialokasikan sebagai kredit

bergulir, PEMDA hanya dapat memberikan kredit kepada UMKM sebesar dana yang dipunyai tersebut. Dengan penjaminan kredit, maka dengan asumsi *gearing ratio* Lembaga Penjamin Kredit (LPK) yang ditetapkan adalah sebesar 20 kali, maka kredit yang bisa disalurkan kepada UMKM adalah sebesar Rp200 milyar. Dengan besarnya kredit yang dapat dialokasikan pada sektor UMKM maka *multiplier effect* bagi perekonomian daerah juga akan semakin besar sehingga pertumbuhan ekonomi akan dapat semakin terstimulasi.

10. KESIMPULAN

Optimalisasi peran PEMDA dengan melakukan penjaminan kredit UMKM yang diajukan kepada perbankan dirasakan sangat strategis dalam upaya pemberdayaan UMKM di daerah. Skema penjaminan yang dilakukan dapat dipilih dari alternatif-alternatif sesuai dengan kondisi daerah. Dengan penjaminan ini, maka pemberdayaan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun permodalan melalui mekanisme perbankan dapat dilakukan sehingga hasil yang diperoleh akan dapat lebih optimal.

Laju pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Tengah yang cukup tinggi dalam 2 triwulan terakhir akan tetap berlanjut sampai dengan akhir tahun 2006 walaupun akan sedikit mengalami perlambatan pada triwulan III-2006 seiring dengan menurunnya sektor pertanian yang disebabkan karena faktor musiman. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha dimana ekspektasi dunia usaha terhadap situasi bisnis 6 bulan mendatang berada pada tingkat optimis yang mengindikasikan bahwa sektor riil masih cukup yakin bahwa kondisi ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah akan semakin membaik. Distribusi barang dari Kota Banjarmasin ke Kota Palangka Raya dan sekitarnya yang semakin lancar sejak diresmikannya jembatan layang Tumbang Nusa akan menjadi stimulus positif bagi sektor perdagangan. Sementara itu, MoU antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Departemen Koperasi & UKM dan Departemen Perindustrian mengenai pembangunan kawasan Industri Kecil Menengah "Tumenggung Tilung" dalam jangka panjang akan dapat menggerakkan kembali sektor industri pengolahan berbasis kayu yang sempat mengalami kelesuan sejak dilakukannya penertiban *illegal logging* oleh Pemerintah Daerah.

Di sisi inflasi, tekanan inflasi dari sisi suply khususnya bahan makanan masih akan terjadi khususnya karena kegagalan panen di beberapa daerah di Kalimantan dan Jawa yang secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan pasokan bahan makanan di Kalimantan Tengah. Secara umum, tekanan dari sisi faktor distribusi barang akan jauh berkurang seiring dengan semakin lancarnya jalur distribusi Banjarmasin – Palangka Raya. Dari kelompok komoditas yang lain, kelompok pendidikan diperkirakan akan mengalami tekanan karena melonjaknya permintaan sebagai dampak dari dimulainya tahun ajaran baru.

Di sisi perbankan, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan Kalimantan Tengah diperkirakan akan mengalami peningkatan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Stimulus kredit perbankan antara lain adalah proyek-proyek yang dibiayai APBD dan APBN pada tahun 2006. Percepatan realisasi APBD yang sampai dengan triwulan II-2006 realisasinya diketahui masih cukup rendah akan menjadi salah satu pendorong peningkatan kredit perbankan pada triwulan III dan IV 2006.